

Masyarakat

ASEAN

Edisi 16 / September 2017

MAJU BERSAMA

Wawancara Khusus:

Menteri Luar Negeri RI



ISSN: 9 772460 168002





DAFTAR ISI

PERSPEKTIF

- 4 50 Tahun ASEAN, Kerja Keras yang Harus Senantiasa Dijaga

LAPORAN UTAMA

- 12 50 Tahun ASEAN Telah Buktikan Diri Sebagai Motor Perdamaian dan Stabilitas Kawasan

LAPORAN KHUSUS

- 14 *Partners in Anniversary: 40 Tahun Kemitraan ASEAN dan Mitra Wicara*
- 18 Capaian Penting Negosiasi COC
- 24 Bangun Profesionalisme, Bawa ASEAN Tahan Bencana

WAWANCARA

- 6 Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi
50 Tahun ASEAN: Mewujudkan Ekosistem Perdamaian dan Kesejahteraan
- 28 Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana, Dr. Sugimin Pranoto Penggerak Sertifikasi Profesi

REPORTASE

- 30 Indonesia Turut Mempercantik ASEAN
- 33 Taman ASEAN Pertama, Jombang Catat Sejarah

POJOK PSA

- 34 Membangun Strategi Pertahanan Cyber di ASEAN



APA KATA MEREKA

38 “Upgrade Mimpi, Anak Muda Indonesia Kuasai Masa Depan ASEAN”

40 GALERI FOTO

POJOK SOSIALISASI

42 Belajar ASEAN Sambil Bersenang-senang di *Matasora World Music Festival 2017*

44 Pemuda ASEAN Bicara *Digital Diplomacy*

46 Indonesia Rayakan 50 Tahun ASEAN

Bagi anda yang ingin mengirimkan tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silakan kirim melalui email: mma@kemlu.go.id



Pengarah

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN

Penanggung Jawab

Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN

Redaktur

Heru Prayitno
Bambang Witjaksono
Hikmat Moeljawan
Mahmudin
Annie Yuliyanti

Staf Redaksi

Niwa Rahmad Dwitama
Argo Budi Prakoso
Michael F. Bastian Supit
Amelia Limanjaya
Thalita Evani Hindarto
Lindi Mahesi
Endang Susilowati
Rendy Hadiputra Hadi
Bayu P. Oktavriyanto
Mia Padmasari
Shirley Besauli Agustina
Ivory Chaka Nathara Pranashanti

Desain Grafis/Fotografer

Firmansyah Kustiawan
Sylvia Masri
Tomy Satria

Pemelihara Situs Web

Melisa Helingo

Distribusi

Kasirun
Tuwuh Ismail
Mulyanto

Sekretariat

Basyiruddin Ahmad Hidayat
Didi Suparyadi
Rusmanto
Tb. M. Ramadhan
Kosasih

Alamat Redaksi

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri
Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat
Telp. 021-3509050/3509059
Fax. 021-3509050

50 TAHUN ASEAN, KERJA KERAS YANG HARUS SENANTIASA DIJAGA



Jose Tavares

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN

Lima puluh tahun yang lalu, Menteri Luar Negeri lima negara anggota awal ASEAN membicarakan arah masa depan Asia Tenggara di tengah carut marut hubungan diplomatik negara-negara tersebut dan ancaman perang dingin. Pembahasan sekitar perbaikan hubungan diplomatik antara negara anggota, penyelesaian sengketa secara damai, dan peningkatan kepercayaan melalui kerja sama ekonomi dan kebudayaan menjadi fokus utama yang tercermin dalam Deklarasi Bangkok.

Kini, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-50 yang digelar di Manila bukan hanya dihadiri negara anggota ASEAN yang kini telah berjumlah 10 negara, tetapi diikuti juga oleh Mitra Wicara (Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Kanada, Rusia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, Selandia Baru, dan Uni

Eropa). Selain itu, pertemuan diikuti juga oleh negara peserta *ASEAN Regional Forum* yang terdiri dari 10 negara ASEAN, 10 mitra wicara di atas, serta Bangladesh, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Papua New Guinea, Sri Lanka, dan Timor Leste. Isu yang dibahas bukan lagi terbatas pada permasalahan di Asia Tenggara, tetapi mencakup isu-isu global yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia.

ASEAN berdiri sama tinggi dengan negara-negara di dunia dan mampu mengubah arah kebijakan dunia. Di bidang lingkungan hidup, ASEAN berhadapan dengan AS untuk mendorong adidaya tersebut meratifikasi *Paris Agreement on Climate Change*. Selain itu, ASEAN juga mendorong seluruh mitra, utamanya AS, RRT, Jepang, Rusia, India untuk menjadi kekuatan global dan regional yang bertanggung jawab

untuk perdamaian dunia. Di bidang ekonomi, ASEAN yang kini telah menjadi kekuatan ekonomi ke-enam dan pasar ketiga terbesar di dunia, berinisiatif membentuk *Regional Comprehensive Economic Agreement (RCEP)*. Jika berhasil, RCEP akan melingkupi 30% global GDP dunia, atau sekitar 20 triliun dolar, dan menjadi pasar bagi 3 miliar orang, hampir setengah penduduk dunia.

Tidak ada yang menduga bahwa ASEAN dapat berubah menjadi kawasan yang berkembang dengan pesat. ASEAN menjadi satu-satunya organisasi regional di Asia Pasifik yang mampu membawa negara-negara besar duduk satu meja ketika hubungan diantara negara-negara tersebut tidak berlangsung baik, seperti *ASEAN Plus Three* yang membawa RRT, Jepang, dan Republik Korea bertemu secara reguler.



“Selama lima puluh tahun ASEAN telah menjadi organisasi yang dinamis dan diapresiasi oleh dunia internasional. Fondasi kerja sama sederhana yang dibangun lima puluh tahun silam di Bangkok telah berubah menjadi suatu Masyarakat ASEAN yang memiliki arsitektur kawasan maju.”

Butuh diplomasi yang ajeg dan kebesaran hati untuk membawa ASEAN hingga saat ini. Indonesia dan negara pendiri awal harus mampu mengesampingkan perselisihan demi mencapai tujuan bersama: perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Penyelesaian sengketa yang dahulu dilakukan melalui pendekatan kekuasaan, diubah menjadi penyelesaian damai tanpa menggunakan kekerasan. Dalam prosesnya, identitas dan norma dasar ASEAN terbentuk dan merekatkan hubungan antar anggota.

Capaian yang kita nikmati saat ini merupakan hasil kerja keras yang harus senantiasa dijaga. Tantangan ASEAN semakin meningkat seiring dengan cepatnya perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia. Sengketa teritorial, ancaman terorisme, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, timbulnya gerakan

anti-regionalisme, dan hubungan antara *major-powers* yang sangat rentan dapat membawa dampak negatif terhadap stabilitas dan perekonomian kawasan.

Menghadapi tantangan tersebut, ASEAN perlu bersikap responsif dan *action oriented*. Paradigma non-intervensi yang kaku dan lamanya proses konsensus harus mampu diubah oleh ASEAN. Setiap isu yang dapat berimplikasi pada keamanan kawasan harus bisa dibahas dan dicarikan solusi cepat oleh ASEAN.

Di sisi lain, ASEAN harus mampu membangun Masyarakat ASEAN yang berpusat dan berorientasi pada rakyat. Inklusifitas ASEAN, dengan membuka ruang partisipasi yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan, menjadi kunci penerimaan ASEAN di masyarakat. Untuk itu, isu-isu yang menjadi

perhatian masyarakat seperti hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah perlu mendapat sorotan lebih.

Selama lima puluh tahun ASEAN telah menjadi organisasi yang dinamis dan diapresiasi oleh dunia internasional. Fondasi kerja sama sederhana yang dibangun lima puluh tahun silam di Bangkok telah berubah menjadi suatu Masyarakat ASEAN yang memiliki arsitektur kawasan maju. Untuk itu, kita harus mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari Masyarakat ASEAN dan menjaga ASEAN tetap relevan sebagai soko guru politik luar negeri Indonesia.

MENTERI LUAR NEGERI RI

RETNO L.P. MARSUDI

50 TAHUN ASEAN: MEWUJUDKAN EKOSISTEM PERDAMAIAN DAN KESEJAHTERAAN

“Melalui ASEAN kita menciptakan ekosistem untuk perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan.”

Dalam usia ASEAN yang memasuki 50 tahun, apa saja hasil positif kerja sama ASEAN terhadap Indonesia saat ini?

Indonesia sebagai salah satu *founding fathers* ASEAN, memiliki kewajiban moral untuk menunjukkan bahwa ASEAN telah dan akan terus menjadi asosiasi yang membawa

manfaat bagi seluruh masyarakat negara anggotanya.

Melalui ASEAN kita menciptakan ekosistem untuk perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Hasil positif yang dapat kita rasakan adalah selama hampir 50 tahun, ASEAN telah menikmati kondisi kawasan yang relatif aman, stabil, dan damai. Terciptanya

ekosistem yang stabil dan damai tersebut membuka jalan bagi terwujudnya ekosistem kesejahteraan (*prosperity*), yang terus dilaksanakan melalui Masyarakat ASEAN.

Apakah tantangan terbesar ASEAN dalam upaya mewujudkan ekosistem *prosperity*?

Saat kita berbicara mengenai *prosperity*, tantangannya adalah bahwa *prosperity* tersebut harus dapat dinikmati oleh semua masyarakat ASEAN. Artinya, ASEAN harus dapat mendekatkan perbedaan atau kesenjangan pembangunan dari masing-masing negara anggotanya.

Saat ini, data menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata ekonomi ASEAN mencapai 4,7 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata ekonomi dunia yaitu 3,1 persen. Namun, tantangannya adalah bagaimana membagi pertumbuhan ekonomi ini secara lebih merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang dapat memicu permasalahan.

Apakah solusi terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut?

ASEAN adalah organisasi yang *people-centered* dan *people oriented* dan dalam implementasinya mengutamakan *we feeling*. *People-centered, we feeling, caring society* tidak akan dapat tercipta kalau masyarakat ASEAN tidak bisa merasakan kegunaan dari keberadaan ASEAN.

Banyak sekali yang sudah kita lakukan dan capai di ASEAN, dalam 50 tahun terakhir. Beberapa di antaranya bahkan menurut saya dapat disebut *beyond our imagination*, karena pada saat kita membentuk ASEAN pada tahun 1967, terdapat begitu banyak perbedaan. Tidak hanya dari luas geografis, perbedaan yang ada mencakup kondisi ekonomi, sistem politik, agama yang dianut, dan lainnya.

ASEAN juga berangkat dari kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik. Pada tahun 1965, kondisi ekonomi Indonesia juga umumnya tidak bagus dimana kita pernah mengalami inflasi sampai 600 persen. Kemudian kita bertekad membentuk suatu asosiasi, dan setelah 50 tahun, alhamdulillah kita lihat hasilnya bahwa kawasan kita relatif lebih stabil dan damai.

Saya percaya bahwa kawasan ASEAN yang stabil dan damai tersebut

Apa yang harus dilakukan ASEAN agar tetap relevan di masa mendatang?

ASEAN harus mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi ke depan. Tentunya tantangan di masa mendatang akan berbeda dengan tantangan pada 50 puluh tahun ke belakang, dan kemampuan mengidentifikasi tantangan dapat membantu kita mempersiapkan



membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang baik. Ini harus semakin disadari oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ASEAN lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia rata-rata. Indonesia pertumbuhan ekonominya cukup bagus, yaitu lebih dari 5 persen rata-rata. Vietnam bisa tumbuh 6 persen. Jadi saya sangat optimis, *thanks God, in the last 50 years*, ASEAN telah dan terus berkesinambungan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dan Masyarakat ASEAN secara keseluruhan.

program dan target dengan lebih baik. Nah, kalau di 50 tahun ke belakang *center-nya* adalah kita sebagai organisasi ASEAN, maka 50 tahun ke depan kita harus mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih baik di luar lingkup ASEAN, untuk dunia.

Saat ini ekonomi kita sudah kuat, terlihat dari 97 persen pos yang tarifnya sudah 0 persen. Dengan kata lain, sebagai suatu kesatuan ekonomi kita sudah satu. Sekarang, kuncinya adalah bagaimana kita

mengembangkan persatuan ekonomi ini secara lebih luas. Salah satunya adalah melalui negosiasi *Regional Economic Comprehensive Partnership* (RCEP). Melalui RCEP, persatuan ekonomi ASEAN akan terhubung dengan enam mitra secara sekaligus yang tentunya mampu mendorong relevansi ASEAN di masa mendatang selain melalui ASEAN+1.

Bagaimana dengan kekhawatiran bahwa Indonesia tidak akan mampu bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)?

Kita harus tepis kekhawatiran itu. Data-datanya saya kira cukup kuat. Dari keseluruhan investasi yang masuk ke ASEAN, Indonesia termasuk negara yang paling banyak

menyerap investasi di kawasan ASEAN. Begitu juga dari sisi perdagangan, data menunjukkan bahwa Indonesia sebagian besar melakukan perdagangan dengan Negara-negara Anggota ASEAN. Jadi kalau ada kekhawatiran itu, saya bisa sampaikan bahwa kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita hidup dalam era persaingan dan harus mampu bersaing dan terus mempersiapkan diri.

Sejauh ini saya sangat optimis bahwa Indonesia akan mampu bersaing di antara negara anggota ASEAN. Data terkini menunjukkan bahwa kita adalah penerima manfaat paling besar dari pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN, saya kira kalau kita memang betul-betul mau bekerja dengan baik, *Insha Allah* manfaat ASEAN itu akan sangat besar bagi Indonesia. Memang kita harus bekerja keras karena kita sedang bersaing.

Salah satu kesepakatan utama yang dihasilkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN tanggal 18-22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia adalah disahkannya *ASEAN 2025: Forging Ahead Together*. Apa pentingnya dokumen tersebut bagi ASEAN dan Indonesia?



Dokumen *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* berisikan langkah-langkah strategis implementasi Masyarakat ASEAN hingga 2025 guna memastikan Masyarakat ASEAN 2025 tetap relevan menghadapi tantangan zaman.

Melalui *ASEAN 2025: Forging Ahead Together*, ASEAN diharapkan menjadi:

- organisasi yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat dan melibatkan peran serta rakyat secara aktif.
- kekuatan pendorong untuk memimpin ekonomi.
- kawasan yang semakin damai dan stabil, terintegrasi secara ekonomi, *outward looking*, serta

merangkul seluruh pemangku kepentingan.

Apa modal utama ASEAN dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan, terutama mempertimbangkan berbagai tantangan yang timbul akibat dinamisnya konstelasi pada tataran global dan kawasan?

Beberapa tantangan ASEAN yang telah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan adalah *geopolitical rivalries*, terorisme dan kejahatan lintas negara, serta *welfare-gap*. Berbagai tantangan tersebut dapat diatasi dengan kekompakan yang terjalin diantara negara-negara

anggota ASEAN pada semua tingkatan.

Prinsip *unity* dan *centrality* ini, menjadi bagian krusial untuk mengelola berbagai isu di tengah perkembangan geopolitik kawasan dan dunia. Tantangan ke depan lebih kompleks dan dinamis yang terus memerlukan upaya bersama, termasuk persatuan, kohesivitas dan sentralitas ASEAN.

Sebagai organisasi yang berinteraksi dengan semua kekuatan besar dunia, serta sebagai kawasan yang dihuni oleh kekuatan-kekuatan besar, ASEAN tidak akan masuk ke dalam pusaran persaingan, justru menjadi organisasi yang akan secara aktif berinteraksi melalui berbagai mekanisme yang telah dibentuk



untuk menjaga keseimbangan dinamis kawasan.

Isu *violent extremism* semakin marak, dan pemuda kerap dijadikan agen. 60 persen Masyarakat ASEAN adalah kelompok usia di bawah 40 tahun. Langkah-langkah apa yang sebaiknya dilaksanakan agar pemuda ASEAN justru menjadi aktor kunci pencegahan penyebaran paham ekstrim dan kekerasan?

Kerja sama ASEAN dalam penanggulangan terorisme semakin dengan adanya *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* yang ditandatangani pada 13 Januari 2007 dan mulai berlaku sejak 27 Mei 2011. Konvensi ini merupakan instrumen hukum ASEAN pertama di bidang kejahatan lintas negara.

Mekanisme penanggulangan terorisme dalam ASEAN antara lain:

- *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*,
- *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM-Plus)*,
- *ASEAN Regional Forum (ARF)*, dan
- mekanisme kerja sama ASEAN dengan sejumlah Mitra Wicara ASEAN.

Menurut saya, pemuda adalah pemegang tongkat estafet kepemimpinan dan di tangan mereka

terletak masa depan bangsa dan kawasan, dengan demikian, kita perlu memberi ruang lebih luas bagi para pemuda untuk berperan aktif dalam mencegah dan menanggulangi *violent extremism* dan terorisme.

Kelompok pemuda yang melek atau *literate* teknologi dan terkoneksi satu sama lain memiliki potensi besar untuk dapat menjadi aktor kunci mencegah paham ekstrim kekerasan. Pemuda juga dapat diberi kesempatan untuk menjadi promotor narasi perdamaian dan toleransi, paling tidak di kalangan pemuda dan masyarakat ASEAN.

Pemuda juga dapat mengambil peran lebih besar untuk upaya pemberdayaan komunitas yang mendorong penghormatan terhadap keberagaman dan hak berpendapat, serta terlibat lebih aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan sosial dan penanggulangan paham ekstrim kekerasan.

Merayakan HUT ke-50 ASEAN, kegiatan apa saja yang Kemlu selenggarakan?

Dalam rangka HUT ke-50 ASEAN, Kemlu telah merancang berbagai



kegiatan yang sejalan dengan kepentingan tersebut, misalnya:

- *CEO Forum 2017: Sharing of Success Stories, Experiences and Best Practices* yang akan memungkinkan pengusaha-pengusaha UKM Indonesia memperoleh informasi dan *insights* dari beberapa CEO perusahaan yang telah eksis di berbagai negara di ASEAN.
- *ASEAN Youth Interfaith Camp* di UNIPDU Jombang untuk mendorong partisipasi pemuda-pemuda dari negara-

negara anggota ASEAN dalam mempromosikan toleransi kehidupan beragama.

- Parade ASEAN 50 pada 27 Agustus 2017 yang menampilkan pawai masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok dengan menampilkan berbagai keunikan dan penampilan seperti parade bendera ASEAN, parade kostum, parade tari dan gerak, musik dan keunikan lainnya.
- Pemilihan Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 guna mencari sosok pemuda/i Indonesia dari

setiap provinsi yang berprestasi serta memiliki wawasan luas mengenai Indonesia dan ASEAN, serta

- Duta Muda ASEAN-Indonesia yang akan menjadi agen diseminasi informasi dan menularkan semangat ASEAN kepada masyarakat dan kaum muda guna meningkatkan manfaat ASEAN dalam momentum hari jadi ASEAN yang ke-50.



50 TAHUN ASEAN TELAH BUKTIKAN DIRI SEBAGAI MOTOR PERDAMAIAN DAN STABILITAS KAWASAN

“ASEAN telah menjadi aktor kawasan dan global yang dihormati melalui *ASEAN-led mechanism* untuk membangun dialog dengan negara di kawasan dan di luar kawasan.”

“Di tengah keraguan terhadap multilateralisme dan regionalisme, ASEAN telah membuktikan diri sebagai motor perdamaian dan stabilitas kawasan,” demikian disampaikan Menlu RI Retno Marsudi, dalam pernyataannya pada sesi pleno *ASEAN Foreign*

Ministers' Meeting di Manila, Filipina (5/8).

Pada sesi pleno yang membahas *ASEAN community building*, Menlu RI menekankan bahwa selama 50 tahun terakhir, ASEAN telah berhasil menciptakan

ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan. Keberhasilan ASEAN tersebut telah mencegah terjadinya konflik terbuka, memicu pembangunan ekonomi dan kesejahteraan kawasan yang menjadikan ASEAN sebagai mesin pertumbuhan kawasan dan dunia.

“Keberhasilan ASEAN dapat dilihat dari kawasan kita yang damai dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata dunia,” tutur Menlu Retno.

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan bahwa keberhasilan ASEAN tersebut terjadi karena beberapa kekuatan ASEAN seperti dapat membangun institusi yang menekankan pada perdamaian dan stabilitas. ASEAN juga telah berhasil menghindari *megaphone diplomacy* dan mengedepankan diplomasi dan dialog. Selain itu, ASEAN telah berhasil membangun suatu *rule-based association*. Semua ini merupakan bagian dari *ASEAN Way* yang berhasil membuat ASEAN untuk berinteraksi dengan baik diantara anggota dan juga negara-negara di luar kawasan. “ASEAN telah menjadi aktor kawasan dan global yang dihormati melalui *ASEAN-led mechanism* untuk membangun dialog dengan negara di kawasan dan di luar kawasan,” sebut Menlu RI.

Namun demikian, untuk terus dapat menjaga keberhasilan yang telah dicapai, Menlu RI menegaskan ASEAN juga harus berhasil dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini maupun tantangan baru. Salah satu tantangan tersebut terkait dengan adanya rivalitas geopolitik, seperti di Laut China Selatan. Dalam hal ini ditekankan bahwa ASEAN harus terus dapat mengelola situasi dengan menghormati prinsip-prinsip dasar dan hukum internasional serta menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak.

Selain itu, ASEAN juga harus dapat mengatasi berbagai tantangan yang

datang dari ancaman kejahatan transnasional dan terorisme. Dalam hal ini Menlu RI menekankan pentingnya untuk ASEAN meningkatkan kerja sama, baik di tingkat regional maupun sub-regional.

Menlu RI juga menegaskan bahwa mengurangi jurang pembangunan antara yang miskin dan kaya masih merupakan tantangan bagi ASEAN. Untuk itu ASEAN perlu untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif, termasuk dengan memberdayakan UMKM, mempercepat perundingan RCEP, dan memberikan perlindungan bagi pekerja migran. “Kunci dari keberhasilan ASEAN kedepan akan ditentukan dari kemampuannya untuk memastikan rakyat ASEAN merasakan hasil dari pembangunan yang dicapai ASEAN,” tutur Menlu Retno.

Menlu RI juga menekankan, kedepan ASEAN akan menghadapi tantangan untuk menjaga dan mempertahankan sentralitas dan kesatuan ASEAN. Tanpa kesatuan dan sentralitas ASEAN, peran ASEAN di kawasan dan dunia dapat menjadi kurang relevan. Untuk itu, Menlu Retno menyerukan agar komunikasi diantara Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN harus ditingkatkan, baik melalui jalur formal maupun informal. “Kita harus terus menjaga dan memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN, dan jangan sampai kawasan ASEAN menjadi *proxy* bagi negara-negara besar,” tutup Menlu Retno.

(Kementerian Luar Negeri RI)





PARTNERS IN ANNIVERSARY: 40 TAHUN KEMITRAAN ASEAN DAN MITRA WICARA

Association of Southeast Asian Nations atau yang kita kenal dengan **ASEAN** memasuki usianya yang ke-50, sebuah pencapaian luar biasa mengingat begitu banyaknya rintangan yang telah dilewati organisasi regional ini untuk mencapai posisinya yang sekarang.

Tentunya pencapaian ASEAN saat ini tidak lepas dari hubungan kerja sama yang telah dibangun bersama Mitra Wicara-nya. ASEAN memiliki

hubungan kerja sama dengan 11 Mitra Wicara penuh (*Full-fledge Dialogue Partnership*), yaitu dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tak hanya merayakan usianya yang ke-50, tahun ini juga, ASEAN merayakan 40 tahun hubungan kerja sama dengan 3 (tiga) Mitra Wicaranya sekaligus, yaitu: Amerika Serikat, Kanada dan Uni Eropa.



Kerja sama ASEAN dan Amerika Serikat (AS) pertama kali terbentuk pada tahun 1977. Saat itu fokus kerja sama hanya diarahkan pada beberapa bidang yang terbatas, seperti komoditas, akses pasar, energi, perkapalan dan keamanan

pangan. Namun, pada awal tahun 1990, orientasi kerja sama ASEAN-AS mengalami perubahan dengan adanya peluncuran sejumlah program kerja sama yang berfokus pada perdagangan dan investasi, transfer teknologi dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kerja sama antara kedua pihak terus ditingkatkan dan pada tahun 2005, di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN-AS, kedua pihak menyepakati *Joint Vision Statement on the ASEAN-U.S. Enhanced Partnership*. Kesepakatan ini bermuara pada diadopsinya 2 (dua) dokumen yang menjadi cikal bakal perluasan kerja sama di pilar politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya serta pembangunan yaitu *Plan of Action to Implement the ASEAN-U.S. Enhanced Partnership* (2006) dan *Revised Priorities for Cooperation under the ASEAN-U.S. Enhanced Partnership* (2009).

Pada November 2011, bertempat di Bali, para Pemimpin ASEAN dan Amerika Serikat kembali menyepakati peningkatan hubungan kerja sama kedua pihak melalui diadopsinya *Plan of Action to Implement the ASEAN-U.S. Enhanced Partnership 2011-2015 for Enduring Peace and Prosperity*. Dokumen ini berisi pemetaan strategi serta prioritas untuk memperkuat kerja sama ASEAN-AS. Dengan diadopsinya dokumen tersebut, di Kuala Lumpur, Malaysia, November 2015, Para Pemimpin/Kepala Negara sepakat untuk semakin meningkatkan hubungan kerja samanya menjadi Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*). Tujuan dan Visi Kemitraan Strategis ASEAN-AS tersebut dituangkan dalam dokumen *Plan of Action to Implement the*

ASEAN-U.S. Strategic Partnership 2016-2020. Rencana Aksi tersebut memuat komitmen Amerika Serikat untuk mendukung Masyarakat ASEAN di ketiga pilarnya, dengan fokus pada 5 (lima) prioritas area kerja sama, yaitu: integrasi ekonomi, maritim, tantangan lintas negara termasuk perubahan iklim, emerging leaders dan pemberdayaan wanita.



ASEAN-CANADA
40 Years of Dialogue Relations

Tak hanya Amerika Serikat, tahun 2017 merupakan tahun yang istimewa dalam kemitraan ASEAN dan Kanada yang juga memasuki tahun ke-40. Komitmen kerja sama ASEAN-Kanada diawali dengan adanya proposal bantuan kerja sama pembangunan oleh Pemerintah Kanada kepada ASEAN yang

kemudian diterjemahkan dalam perjanjian kerja sama *ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement (ACECA)* di tahun 1981. ACECA berfokus pada kerja sama di bidang industri, perdagangan serta bantuan teknis. Pada tahun 1993, dilakukan penandatanganan revisi ACECA oleh kedua pihak dengan lebih berorientasi pada kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan lingkungan, pembangunan institusi, manajemen organisasi, hubungan bisnis bilateral dan sektor swasta.

Kerja sama yang semulanya hanya berfokus pada area pembangunan kemudian diperluas dengan mencakup berbagai aspek kerja sama dalam pilar politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya. Komitmen ini dituangkan dalam *Plan of Action to Implement the ASEAN-Canada Enhanced Partnership 2010-2015* yang kemudian diperpanjang untuk periode 2016-2020. Tahun ini, peringatan 40 tahun kerja sama ASEAN-Kanada menjadi semakin istimewa karena juga bertepatan dengan Perayaan 150 Tahun Konfederasi Kanada.

“Pencapaian ASEAN saat ini tidak lepas dari hubungan kerja sama yang telah dibangun bersama Mitra Wicara-nya.”



Selain memperingati 60 tahun *Treaty of Rome*, tahun ini Uni Eropa (UE) juga merayakan 40 tahun kemitraannya dengan ASEAN. Kerja sama ASEAN-UE diformalkan dalam Pertemuan ke-10 Menteri Luar Negeri ASEAN yang menyepakati kerja sama antara ASEAN dan *European Economic Community* (EEC). Pada Maret 1980, ASEAN dan Uni Eropa sepakat untuk meningkatkan intensitas kerja samanya dengan berfokus pada beberapa area kerja sama yang menjadi kepentingan bersama. Pada 2007, dengan diadopsinya *Nuremberg Declaration on an ASEAN-EU Enhanced Partnership*, keduanya menyepakati untuk memperkuat visi dan komitmen bersama dengan berfokus pada kerja sama di berbagai pilar politik dan keamanan, ekonomi dan perdagangan, sosial dan budaya serta pembangunan.

Pada Pertemuan ke-19 Menteri Luar Negeri ASEAN dan Pejabat Tinggi Uni Eropa yang berlangsung pada April 2012 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, kedua pihak menyepakati bahwa diperlukan suatu fokus kerja sama baru. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam dokumen perjanjian *Bandar Seri*

Begawan Plan of Action to Strengthen the ASEAN-EU Enhanced Partnership 2013-2017.

40 Tahun telah dilewati ASEAN maupun Amerika Serikat, Kanada dan Uni Eropa dalam hubungan kerja samanya. Dengan berbagai tantangan global di kawasan, diharapkan AS, Kanada maupun Uni Eropa akan terus menjadi Mitra Wicara yang konstruktif serta dapat diandalkan oleh ASEAN. Tantangan lintas negara termasuk terorisme, perdagangan dan investasi serta perlindungan hak asasi manusia dan buruh migran adalah isu-isu penting yang perlu di-highlight oleh ASEAN bersama 'Partner Anniversary'-nya. Momentum 40 tahun kemitraan ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh ASEAN dan AS untuk terus memperkuat kerja sama dalam mengatasi tantangan lintas negara

melalui program strategis dan konkrit seperti pembangunan kapasitas dalam menangkal radikalisme teroris melalui penggunaan internet, pemberdayaan perempuan dan kaum muda untuk melawan paham ekstrimis serta pertukaran informasi dalam memperkuat pengawasan batas wilayah.

Perdagangan dan investasi juga merupakan sektor kerja sama penting yang perlu menjadi perhatian ASEAN dan Mitra Wicaranya. Uni Eropa merupakan Mitra Dagang terbesar ketiga ASEAN setelah RRT dan Jepang, sebaliknya, ASEAN merupakan Mitra Dagang terbesar keempat Uni Eropa setelah RRT, Amerika Serikat dan Rusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari ASEAN Statistics, hingga November 2016 perdagangan ASEAN-Uni Eropa mencapai 227.64 triliun



dolar. Sementara itu, data *ASEAN Foreign Direct Investment Statistics*, menyebutkan bahwa hingga Oktober 2016, investasi langsung dari Uni Eropa ke ASEAN merupakan yang terbesar dibandingkan Mitra Wicara lainnya, yaitu mencapai angka 20.127 triliun dolar. Kerja sama yang baik ini tentunya perlu untuk terus ditingkatkan khususnya pada aspek pengembangan UMKM dan ekonomi digital, fasilitasi perdagangan serta pemanfaatan *ASEAN-EU Business Council* melalui kerja sama *business-to-business* maupun *government-to-government*.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk didalamnya perlindungan terhadap buruh migran merupakan hal yang fundamental di ASEAN sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN. Kemitraan ASEAN-Kanada selama 40 tahun

telah cukup membuktikan bahwa Kanada merupakan mitra yang signifikan dalam bidang tersebut. Komitmen Kanada dalam isu perlindungan HAM termasuk buruh migran disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada September 2016 melalui peluncuran proyek *Promoting and Protecting the Rights of ASEAN Migrant Workers 2016-2020*. Hal ini tentunya tidak boleh dilewatkan oleh ASEAN begitu saja, mengingat isu perlindungan buruh migran masih menjadi pekerjaan rumah penting yang harus ditangani dengan baik oleh ASEAN.

Perayaan 40 Tahun Kerja Sama ASEAN dengan Amerika Serikat, Kanada maupun Uni Eropa menjadi simbol penting bagi perkembangan hubungan kemitraan para pihak dimaksud di masa mendatang.

ASEAN bersama ketiga Mitra Wicara tersebut harus dapat memanfaatkan hubungan baik yang telah terbina guna kepentingan masyarakat di kawasan. Hubungan kerja sama kemitraan perlu semakin diperdalam dan ditingkatkan demi mencapai perdamaian, keamanan, stabilitas serta kesejahteraan bersama.

Happy 40th Anniversary to ASEAN-U.S., ASEAN-Canada and ASEAN-European Union!

(Amelia Limanjaya, Michael Bastian Supit/ Dit. Kerja Sama Eksternal ASEAN)



CAPAIAN PENTING NEGOSIASI COC

Dua bulan setelah kerangka *Code of Conduct on Parties in the South China Sea (COC)* disepakati di Guiyang, RRT, Menlu ASEAN dan RRT sepakat untuk mengesahkan kerangka COC tersebut yang akan menjadi fondasi kuat untuk menyelesaikan COC yang efektif dan *actionable*. Menlu ASEAN telah menyatakan kesiapannya untuk memulai negosiasi substantif COC dan menugaskan pejabat senior untuk mengawasi negosiasi tersebut dengan pihak RRT. Hal ini terrefleksikan dalam *Joint Communique* Pertemuan Menlu ASEAN di Manila yang dihasilkan pada tanggal 5 Agustus 2017.

Proses negosiasi COC ini merupakan suatu capaian penting yang dihasilkan di Guiyang RRT, Mei 2017, dengan disepakatinya *COC Framework* pada pertemuan ke-14 *ASEAN-China Senior Officials Meeting on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (SOM on DOC)* - mekanisme di bawah pertemuan Menlu ASEAN dan RRT.

Melihat kembali proses negosiasi COC yang telah dimulai sejak tahun 2013, dinamika perdebatan terkait kode etik berperilaku di Laut China Selatan (LCS) ini bukanlah suatu proses yang berjalan mulus dan sederhana, perbedaan pandangan dan pendekatan mewarnai proses

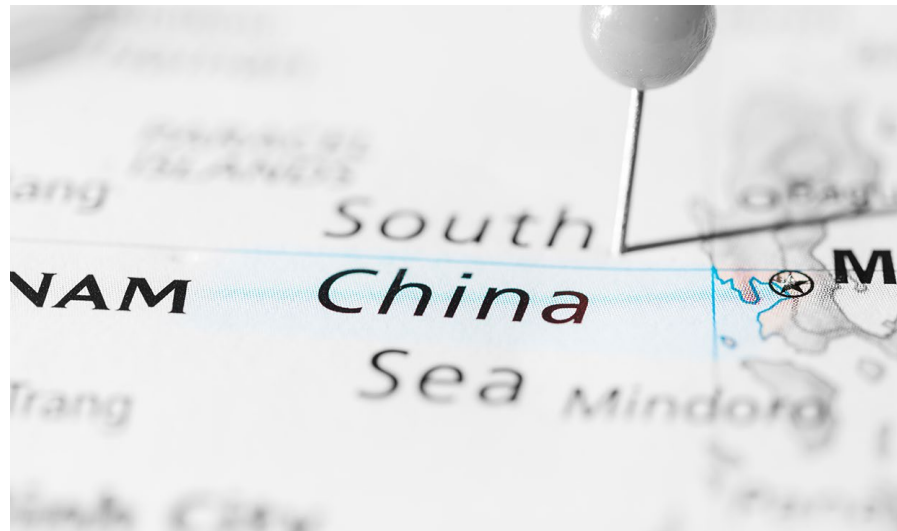
negosiasi antara ASEAN dan RRT. Tahun 2016, ketika *Permanent Court of Arbitration (PCA)* di Den Haag mengumumkan hasil keputusannya, suasana panas terus menjadi bagian dari upaya ASEAN mengelola keamanan dan stabilitas di LCS.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong disepakatinya *COC Framework* oleh Pejabat Senior ASEAN RRT ini, yaitu: momentum hubungan kerja sama ASEAN - RRT

Tahun 2016 merupakan periode yang menunjukkan tingginya ketegangan antara ASEAN dan RRT terkait isu LCS, terutama dengan adanya pengumuman *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada tanggal 12 Juli 2016.

Aspek kunci dari keputusan akhir PCA adalah:

- Klaim RRT atas *historical rights* terhadap wilayah maritim terkait



yang kondusif, upaya aktif ASEAN untuk terus menggaet RRT dalam setiap proses negosiasi demi menjaga "ownership" dari proses tersebut dan adanya kesepahaman antara ASEAN dan RRT untuk menciptakan kemajuan yang substantif dari proses negosiasi COC.

nine-dashed lines bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

- Reklamasi yang dilakukan oleh RRT di perairan LCS tidak memberikan hak maritim apa pun kepada Pemerintah RRT.



- RRT telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina di wilayah ZEE dan landas kontinennya.
- RRT telah menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem terumbu karang di LCS dengan kegiatan reklamasinya.

Meski demikian, ASEAN tetap berhasil mengelola ketegangan tersebut dengan komitmen yang ter-refleksikan dalam *Joint Communique AMM* dan pernyataan bersama Menlu ASEAN terkait menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. ASEAN juga paham bahwa proses negosiasi dengan pihak RRT harus inklusif dengan menggaet RRT dalam proses diplomasi dan tahapan negosiasi yang diupayakan bersama. Upaya yang penuh pertimbangan dan kehati-hatian ini mendukung terciptanya momentum kondusif. ASEAN RRT menyepakati *COC Framework* pada pertemuan *SOM on DOC*, tanggal 19 Mei 2017 di Guiyang, RRT.

Hal ini juga didukung dengan Menteri Luar Negeri ASEAN-RRT yang telah memberikan

mandat kepada pejabat tinggi pada pertengahan tahun 2016 untuk menyelesaikan *Framework* pada pertengahan tahun 2017. Dengan demikian, ketiga faktor yakni hubungan ASEAN-RRT, kerja sama yang inklusif dan kesepahaman antara ASEAN dan RRT memiliki peran signifikan dalam mencapai kesepakatan *COC Framework*.

Indonesia aktif mendorong negosiasi COC

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai strategis dari perdamaian dan keamanan maritim di kawasan. Indonesia terus berperan aktif dalam negosiasi. Pada Februari 2017, Indonesia menjadi tuan rumah dari pertemuan pertama dalam rangka finalisasi untuk menghasilkan *COC Framework* antara ASEAN-RRT di

Bali. Atas dorongan dan konsep yang disiapkan oleh Indonesia, pembahasan substantif tersebut menghasilkan konsep pertama *COC Framework*.

Pada pertemuan di Bali, ASEAN-RRT menyepakati suatu pendekatan (*Bali Approach*) yang telah meletakkan dasar yang kuat untuk upaya mempercepat pembahasan *COC Framework* tersebut. Pertemuan di Bali ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan *JWG on DOC* di Siem Reap, Kamboja, akhir Maret 2017, dan di Guiyang, RRT, Mei 2017.

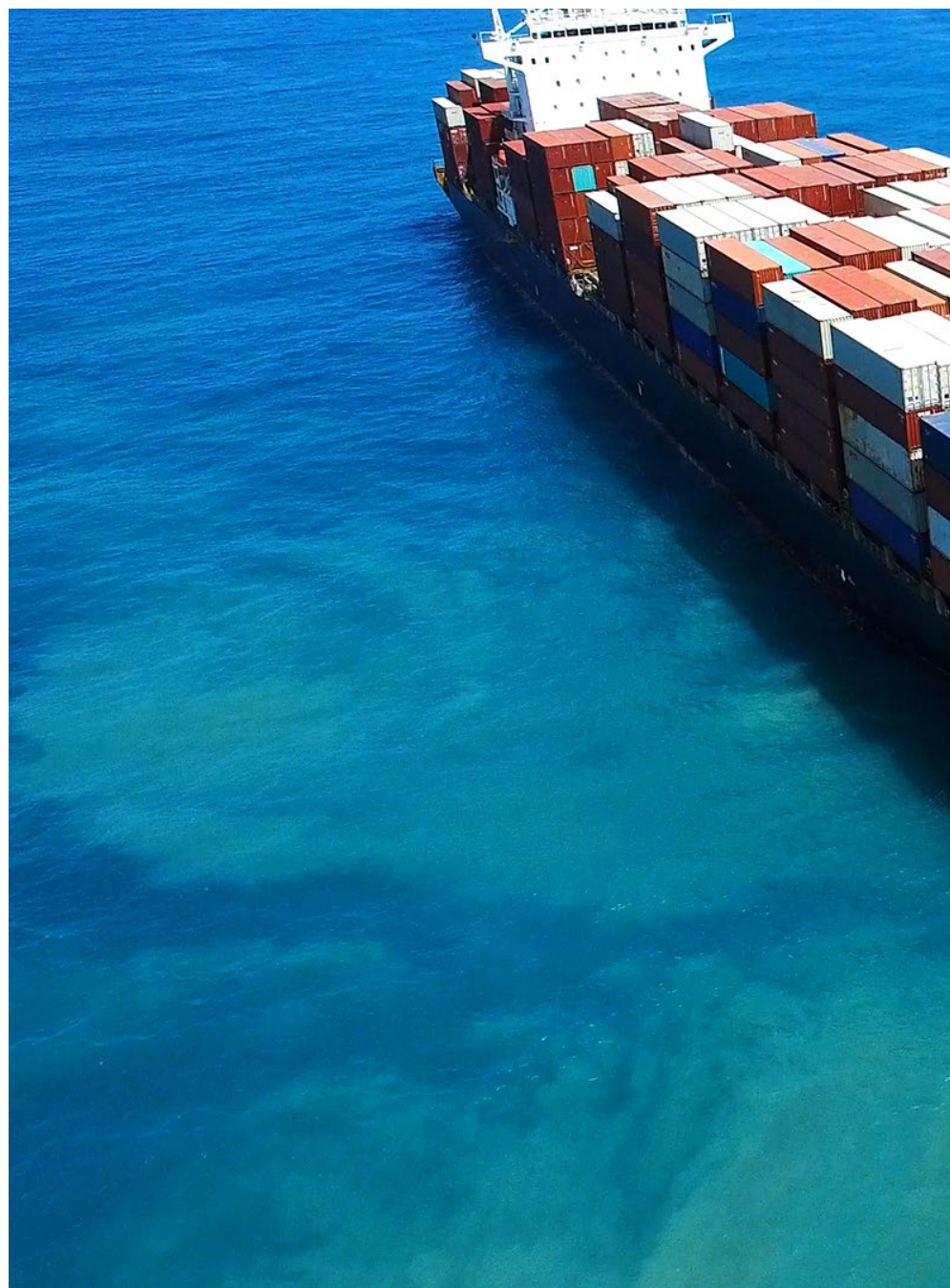
Indonesia secara konsisten menekankan bahwa Indonesia bukanlah *claimant state*. Artinya, kepentingan Indonesia di LCS adalah murni untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Terkait dengan hal ini,

“Sebagai *honest broker*, Indonesia senantiasa menekankan pentingnya implementasi *ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* secara penuh dan efektif.”

Presiden RI Joko Widodo pernah menyatakan bahwa Indonesia siap berperan menjadi *honest broker*, menegaskan kembali posisi dasar Indonesia dalam sengketa tersebut. Sebagai *honest broker*, Indonesia senantiasa menekankan pentingnya implementasi *ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) secara penuh dan efektif. DOC disepakati oleh ASEAN dan RRT pada 2002 dan memandatkan agar ASEAN dan RRT membentuk sebuah *Code of Conduct* (tata perilaku) di LCS, yang masih dinegosiasikan hingga saat ini. Bagi Indonesia, *Code of Conduct* (COC) adalah mekanisme yang tidak akan menghambat proses negosiasi penyelesaian sengketa perbatasan di LCS, namun sebaliknya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memfasilitasi negosiasi tersebut. Salah satu kontribusi Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa di LCS adalah penyelenggaraan *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* yang pertama kali diadakan pada tahun 1990. Seminar tersebut ditujukan untuk membangun rasa saling percaya diantara para pihak-pihak yang berkepentingan di LCS (10 Negara Anggota ASEAN, RRT dan Taiwan) dan membahas kerja sama yang bersifat teknis. Hingga tahun 2016, Seminar tersebut telah diadakan secara konsisten dari tahun ke tahun sebanyak 26 kali.

Tantangan dan Harapan

Sengketa di LCS sedikit banyak telah berpengaruh pada dinamika politik baik antar negara-negara yang terlibat maupun di forum

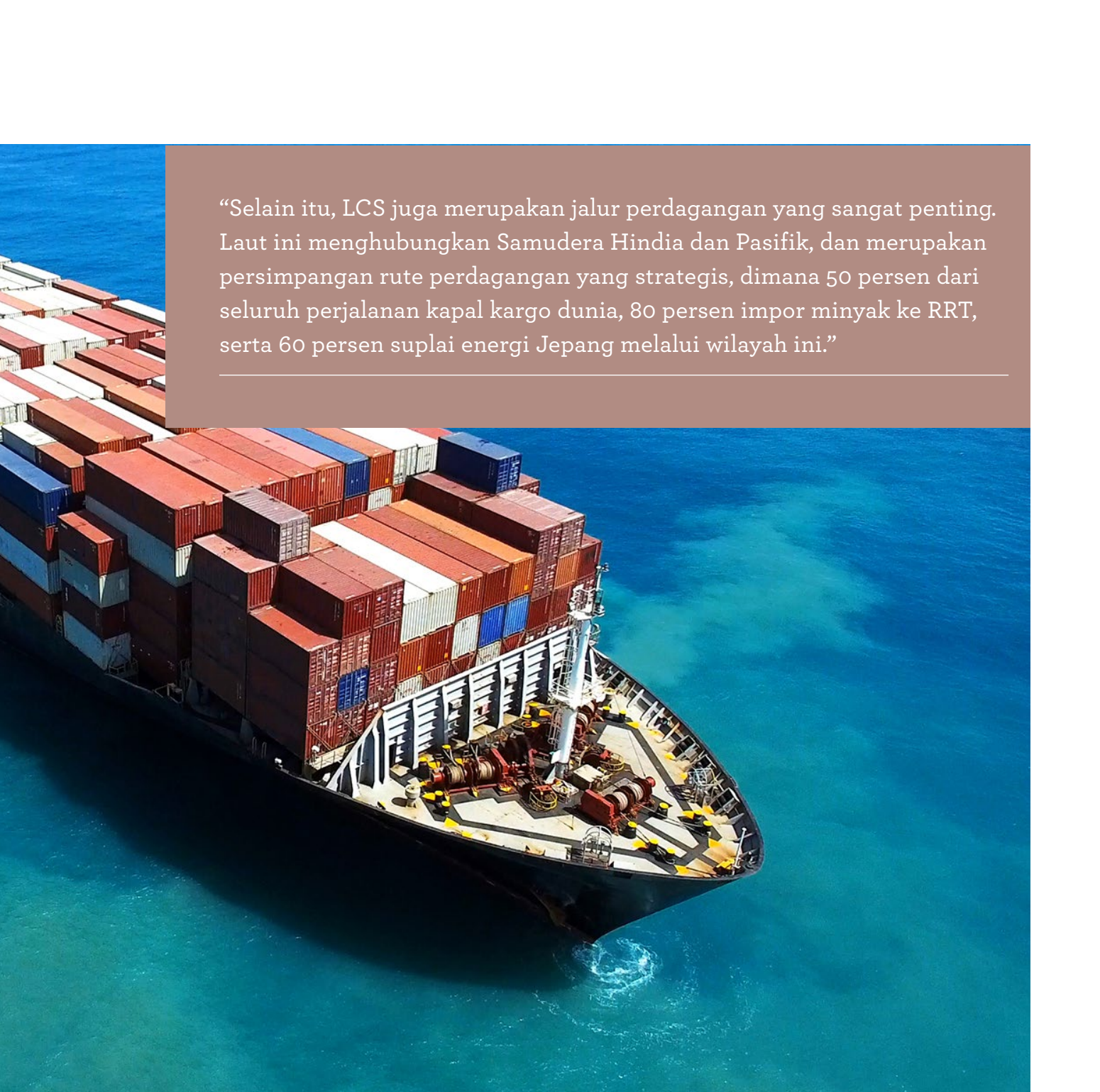


ASEAN. Pada tahun 2012, ASEAN tidak berhasil mengeluarkan *Joint Communique of the 45th ASEAN Foreign Ministers' Meeting* di Kamboja karena tidak dapat menyepakati paragraf terkait isu LCS.

Namun demikian, setelah pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri RI

pada saat itu, Marty Natalegawa, mengadakan *shuttle diplomacy* ke beberapa Negara Anggota ASEAN untuk menjembatani dan memfasilitasi dialog di antara para Menlu ASEAN terkait hal tersebut.

Upaya *shuttle diplomacy* ini menghasilkan kesepakatan *ASEAN's Six Point Principles* yang menegaskan



“Selain itu, LCS juga merupakan jalur perdagangan yang sangat penting. Laut ini menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, dan merupakan persimpangan rute perdagangan yang strategis, dimana 50 persen dari seluruh perjalanan kapal kargo dunia, 80 persen impor minyak ke RRT, serta 60 persen suplai energi Jepang melalui wilayah ini.”

kembali posisi ASEAN dalam isu LCS.

Para Menlu ASEAN menyetujui *ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea* pada tanggal 20 Juli 2012. Dokumen tersebut berisikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *The full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002);*

2. *The Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2011);*

3. *The early conclusion of a Regional Code of Conduct in the South China Sea;*

4. *The full respect of the universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS);*

5. *The continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties; and*

6. *The peaceful resolution of disputes, in accordance with universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).*

Pasca diterbitkannya keputusan *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada tanggal 12 Juli 2016, ketegangan antara Negara Anggota ASEAN dan RRT meningkat. Namun, atas upaya aktif Indonesia melalui proses diplomasi yang intensif dan dengan menjunjung kekeluargaan ASEAN, para Menteri Luar Negeri ASEAN berhasil menyepakati *Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security and Stability in the Region* pada *ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM) ke-49*, 24 Juli 2016, di Vientiane, Laos.

Sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia, pembangunan kerja sama maritim di kawasan tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk ketegangan di Laut China Selatan. Pembangunan infrastruktur maritim di wilayah konflik, kebebasan berlayar (*Freedom of Navigation Operations/ FONOPs*) negara adidaya dan *military build-up* negara di kawasan menjadi beberapa faktor yang menciptakan ketidakpastian dan mengancam pembangunan kepercayaan dalam menanggulangi situasi. Keadaan yang menunjukkan suatu sikap "*show of force*" dari negara-negara terkait.

Di lain pihak, perubahan dinamika global membawa hawa baru dalam politik internasional. Sejak pertengahan kedua dari tahun 2016, beberapa faktor telah dan akan terus mempengaruhi perkembangan di Laut China Selatan (LCS) terutama dinamika hubungan antara Filipina dan RRT

serta perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat. Indonesia dan Negara Anggota ASEAN lainnya harus dapat memanfaatkan peluang dan menanggulangi tantangan untuk terus menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Laut China Selatan.

Wilayah LCS memiliki nilai strategis tersendiri bagi Indonesia. Pertama, laut ini berbatasan langsung dengan Indonesia di Natuna. Kedua, LCS merupakan jalur perdagangan laut yang sangat krusial. Ketiga, wilayah laut ini menyimpan banyak sekali kekayaan alam.

Salah satu wilayah Republik Indonesia, Kepulauan Natuna dan laut di sekitarnya, berbatasan langsung dengan LCS. Implikasinya, wilayah ini merupakan garis terdepan pertahanan dan keamanan Indonesia di Utara, baik atas ancaman tradisional maupun non-tradisional. Jika terjadi konflik terbuka di wilayah



Pertemuan ke-23 ASEAN-China Senior Officials Consultation, Guiyang, RRT, Mei 2017. | Sumber Foto: Philippine News Agency

LCS, maka Indonesia akan terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, LCS juga merupakan jalur perdagangan yang sangat penting. Laut ini menghubungkan Samudera Hindia dan Pasifik, dan merupakan persimpangan rute perdagangan yang strategis, dimana 50 persen dari seluruh perjalanan kapal kargo dunia, 80 persen impor minyak ke RRT, serta 60 persen suplai energi Jepang melalui wilayah ini. Bisa kita bayangkan nilai ekonomi yang terdapat didalam angka-angka tersebut.

Wilayah laut ini juga diperkirakan memiliki potensi sekitar 266 triliun kubik gas alam, 28 miliar barel minyak mentah, serta memiliki sekitar 10 persen dari jumlah ikan tangkap di seluruh dunia. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa LCS merupakan wilayah perairan yang sangat penting bagi dunia. Tidak mengherankan apabila dikatakan bahwa perdamaian, keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut merupakan kepentingan dunia.

Masa Depan Perundingan isu LCS

COC Framework merupakan suatu capaian berarti yang dihasilkan dalam perundingan antara ASEAN dan RRT. Ke depannya, hal yang lebih penting adalah bagaimana kerangka ini dapat digunakan sebagai basis yang kuat untuk dihasilkannya COC sesegera mungkin dan yang dapat diimplementasikan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa perundingan isu LCS mungkin saja

akan terus menghadapi berbagai tantangan. Indonesia dan Negara Anggota ASEAN harus dapat mempertahankan persatuan dan sentralitasnya untuk dapat menjaga situasi kondusif perundingan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam memajukan perundingan COC di LCS.

Berbagai inisiatif baru untuk menjaga stabilitas keamanan terus dikaji dan dicetuskan oleh Indonesia dan Negara Anggota ASEAN lainnya bersama RRT. Beberapa inisiatif itu antara lain, mengintensifkan perundingan COC, implementasi *Code on Unplanned Encounters at Sea* (CUES) serta implementasi *Hotline Communication* di antara para pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Negara Anggota ASEAN dan RRT dalam situasi darurat di LCS. Aktivitas dan kerja sama praktis ini kelak akan meningkatkan rasa saling percaya dan hubungan baik antara ASEAN dan RRT.

Sebagai *honest broker*, Indonesia tentunya harus terus menekankan pentingnya prinsip *self-restraint* dalam mengatasi konflik di LCS. Indonesia akan tetap menolak penggunaan cara-cara militer dalam penyelesaian sengketa di LCS. Militerisasi LCS hanya akan berujung pada perlombaan senjata yang dapat menjadikan kawasan ini rentan terhadap konflik terbuka. Untuk mencegah hal itu, satu-satunya cara adalah Indonesia bersama-sama dengan Negara-negara Anggota ASEAN dan RRT tetap melanjutkan dialog dan perundingan sampai dengan disepakatinya sebuah tata perilaku yang dapat menjadi dasar bagi perwujudan perdamaian dan

stabilitas keamanan di kawasan.

Dengan mandat yang telah diberikan Menlu ASEAN dan RRT kepada pejabat seniornya di *ASEAN Foreign Ministers' Meeting* (AMM), Manila, 6 Agustus 2017, untuk memulai negosiasi COC, ASEAN harus dapat terus menunjukkan kesatuan dan sentralitasnya dalam negosiasi substantif, menyelesaikan COC yang efektif dalam mengelola ketegangan dan menjaga keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan.

Sebagai negara maritim yang meletakkan prioritas politik dan ekonomi di bidang maritim, Indonesia harus terus memainkan perannya sebagai *honest broker* dan negara yang terus mendorong terciptanya hubungan kondusif ASEAN dan RRT, serta pelibatan yang inklusif antara ASEAN dan RRT dalam negosiasi COC. Besar harapan kita bersama ASEAN – RRT dapat mempertahankan momentum ini, menciptakan rasa saling percaya dan kesepahaman untuk menyepakati suatu COC sedini mungkin yang akan menjadi panduan dalam pengelolaan keamanan dan stabilitas di kawasan.

Kerangka COC merupakan capaian penting dalam proses negosiasi. Namun, perundingan COC akan menjadi tahapan yang menentukan dalam upaya ASEAN-RRT untuk menyepakati suatu COC dan terus bekerjasama untuk menciptakan Laut China Selatan yang damai, stabil dan dapat membawa kesejahteraan.

(Niwa R. Dwitama/Dit. Kerja Sama Polkam ASEAN)



BANGUN PROFESIONALISME, BAWA ASEAN TAHAN BENCANA

Indonesia adalah negara kesatuan dengan luas wilayah sebesar 5.193.250 km², serta terdiri atas 17.508 pulau. Fakta ini membuat Indonesia menjadi negara terbesar ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Brazil, dan Australia. Dikarunia berbagai pegunungan berapi dan wilayah perairan yang luas, Indonesia

juga rawan akan bencana alam. Indonesia telah mengalami berbagai bencana alam termasuk Tsunami di Aceh pada tahun 2004. Peristiwa tersebut menjadi eye opener akan pentingnya peningkatan kualitas penanggulangan bencana alam yang dikembangkan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penguatan Profesionalisme Indonesia dalam Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menegaskan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana harus melibatkan kalangan profesional dan ahli. Karenanya, seseorang yang



terlibat dalam misi kemanusiaan harus memiliki standar dan keahlian dalam penanggulangan bencana. Pengalaman Indonesia terkena dampak negatif bencana alam selama satu dekade terakhir, telah mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membentuk standar profesi penanggulangan bencana dan Lembaga Sertifikasi Profesi

Penanggulangan Bencana (LSP PB) sejak tahun 2014.

Selama dua tahun terakhir, LSP PB telah melakukan asesmen atau ujian kompetensi di bidang penanggulangan bencana kepada para sukarelawan, pejabat pemerintah, dan juga sektor swasta berdasarkan Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia dalam

Penanggulangan Bencana (SKKNI PB)

Saat ini, terdapat 54 unit kompetensi kinerja yang telah menghasilkan materi uji kompetensi serta 8 jenis profesi dan 20 jenis pekerjaan terkait penanggulangan bencana, dalam fase respons darurat, seperti penanganan tempat perlindungan (*shelter*), air bersih dan sanitasi, pertolongan

pertama, pusat data dan informasi, pencarian dan penyelamatan korban, pemberian bantuan pertolongan, penilaian secara cepat, dan pimpinan respons darurat. BNPB juga tengah mempersiapkan unit kompetensi lainnya untuk fase pra bencana maupun pada masa pasca bencana.

Kepemimpinan Indonesia Menuju ASEAN yang Tahan Bencana

Selain fokus pada pengembangan profesionalisme di bidang penanggulangan bencana di tingkat nasional, LSP PB terlibat dalam beberapa kegiatan di dalam mekanisme ASEAN yang menegaskan kepemimpinan Indonesia, sebagai berikut:

a. 28th ACDM (ASEAN Committee on Disaster Management) Meeting di Semarang, 26-28 April 2016

Pertemuan tersebut membahas tema *Knowledge and Innovation* serta menyepakati kepemimpinan Indonesia dalam proses sertifikasi dan standarisasi di bidang penanggulangan bencana di tingkat ASEAN. Diakuinya kepemimpinan Indonesia tersebut antara lain didukung oleh modalitas berupa LSP PB dan *Indonesia Disaster Relief Training Ground* (INA DRTG). INA DRTG merupakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana di kawasan Sentul, Bogor yang menjadi pusat *excellence* dan inovasi, baik pada tingkat regional maupun global. Dalam pertemuan tersebut, Ketua LSP PB mempresentasikan “road map” LSP PB dan pengalaman LSP



PB dalam mendorong kompetensi sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana baik di tanah air maupun di kawasan.

b. 1st ACDM KIM Working Group Meeting di Jakarta, 25 Juli 2016

Pertemuan tersebut menyepakati pembagian tanggung jawab di mana Indonesia memimpin kegiatan standarisasi dan sertifikasi, termasuk penyediaan kurikulum pelatihan regional di tingkat ASEAN.

c. 29th ACDM Meeting di Manado, 11 Oktober, 2016

Pada pertemuan ini Indonesia menegaskan bahwa keberadaan LSP PB dan INA DRTG berperan penting dalam mendorong Masyarakat ASEAN yang berkompeten di bidang penanganan bencana. Hal ini selaras dengan Prioritas 8 dalam *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response* (AADMER), yakni “memperkuat mekanisme dan sistem manajemen pengetahuan regional ASEAN serta

profesionalisme untuk mewujudkan ASEAN menjadi pemimpin global dan pusat keunggulan dan inovasi dalam manajemen bencana.”

d. 2nd ACDM KIM Working Group Meeting di Dalat, Vietnam, 2-3 Maret 2017

Pertemuan tersebut menyepakati prakarsa Indonesia mengenai pengembangan kerangka standarisasi dan sertifikasi di ASEAN, yakni *the ASEAN Standardization and Certification for Expert in Disaster Management* (ASCEND) dan rencana pengembangan ASCEND ke depannya.

e. 7th ACDM Recovery Working Group Meeting di Vientiane, Lao PDR, 3 April 2017

Pertemuan ini mengadopsi pengembangan kerangka ASCEND, termasuk 5 (lima) prioritas unit kompetensi, yakni *rapid assessment* (penilaian cepat), *emergency operation centre* (EOC), termasuk

information, communication, and coordination, shelter operation (manajemen tempat perlindungan), water and sanitation (sanitasi air), serta logistic management (manajemen logistik).

Belajar dari peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi di kawasan ASEAN, terlihat bahwa pengalaman, kapasitas, serta kompetensi dari penerapan kebijakan penanggulangan bencana berbeda antara negara anggota ASEAN yang satu dengan negara anggota lainnya. Oleh karenanya ASEAN memiliki Visi "One ASEAN One Response", yakni visi untuk merespons peristiwa bencana alam di dalam maupun di luar kawasan secara efektif berdasarkan prinsip kolaborasi antara berbagai sektor

dan pemangku kepentingan. Hal ini tentunya, memerlukan sinergi dan harmonisasi proses pelatihan sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana.

Arus barang, jasa, dan juga pekerja profesional yang semakin bebas dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuat ekonomi kawasan menjadi semakin terintegrasi. MEA merupakan suatu hal yang nyata dan merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus diberdayakan secara optimal. Unsur legalitas dari keahlian sebagaimana tertera dalam ijazah atau sertifikat dari sekolah ataupun universitas tidaklah cukup sebagai suatu aset untuk berkompetisi di pasar MEA. Tak terkecuali, penguatan profesionalisme dan

standardisasi tenaga kerja menjadi sangat penting dalam mendukung penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Sertifikasi kompetensi kinerja dan pengakuan dari negara anggota lainnya atas kompetensi itu menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, penyetaraan kompetensi kinerja, termasuk dalam hal sumber daya manusia untuk penanggulangan bencana, menjadi hal yang krusial untuk memfasilitasi pergerakan dan migrasi tenaga kerja di antara negara-negara ASEAN, terkhususnya untuk misi-misi kemanusiaan.

(Argo Budi Prakoso /Dit. Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN)



DR. SUGIMIN PRANOTO, KETUA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENANGGULANGAN BENCANA, PENGGERAK SERTIFIKASI PROFESI



Dr. Sugimin Pranoto, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB)

“Dengan memiliki kompetensi tertentu dalam penanggulangan Bencana, tidak akan mengakibatkan permasalahan dalam proses penanggulangan bencana.”

Bermula pada tahun 2012, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempelajari UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam yang memuat amanat untuk memberikan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 15 di dalam UU tersebut, (diatur mengenai, -red) unsur pelaksana, yakni unsur yang mempunyai

fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Keanggotaan unsur pelaksana dimaksud terdiri atas tenaga profesional dan ahli. Oleh karena itu, LSP PB kemudian dibentuk sebagai lembaga yang dapat menetapkan standar dan memberikan sertifikasi bagi orang-orang yang ingin menjadi tenaga profesional dan ahli di bidang penanggulangan bencana.

Bagaimana posisi dan hubungan LSP-PB dengan BNPB sebagai instansi induk?

BNPB mendirikan LSP-PB sebagai lembaga sertifikasi profesi kategori 2 dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Adapun terdapat 3 (tiga) kategori lembaga sertifikasi profesi, yakni:

Lembaga kategori 1, yaitu lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan kapasitas pegawai masing-masing. Misalnya, perusahaan Astra membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk meningkatkan kualitas pegawainya; Lembaga kategori 2, yaitu lembaga yang dibentuk oleh lembaga di industrinya, dan Lembaga kategori 3, yaitu lembaga yang dibentuk untuk melindungi asosiasi profesinya. Misalnya, asosiasi-asosiasi profesi seperti asosiasi dokter atau akuntan.

LSP-PB dapat dikategorikan sebagai lembaga kategori 2 karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik di kalangan Pemerintah, sektor swasta, maupun di dalam masyarakat itu sendiri. LSP-PB itu sendiri bertanggung jawab perihal *progress* pekerjaan yang telah dilaksanakannya kepada BNPB dan sekaligus kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terkait masalah administratif. Terkait pelaporan mengenai *progress* pekerjaan tersebut, LSP-PB melapor kepada BNSP tiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagaimana perjalanan perundingan di tingkat ASEAN hingga akhirnya Indonesia dipercaya untuk memimpin aktivitas di bidang sertifikasi dan standarisasi profesi penanggulangan bencana di ASEAN?

Dalam pertemuan *ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) working group* di bidang *Knowledge and Information Management (KIM)* di Semarang, pada tahun 2016, sepuluh negara anggota ASEAN yang hadir menyadari bahwa sesuai dengan dokumen *ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work Programme 2016-2020*, program prioritas kedelapan yakni *ASEAN Leadership for Excellence and Innovation in Disaster Management*, sangatlah diperlukan usaha untuk membangun profesionalisme di bidang penanggulangan bencana melalui proses standarisasi dan sertifikasi. Selanjutnya, diputuskan bahwa standarisasi dan sertifikasi yang mencakup penyediaan kurikulum pelatihan regional ASEAN menjadi tanggung jawab Indonesia.

Bagaimana proses standarisasi dan sertifikasi yang telah dilakukan oleh Indonesia, atau dalam hal ini LSP PB sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut?

Indonesia saat ini mengembangkan kerangka the *ASEAN Standardization and Certification for Expert in Disaster Management (ASCEND)*. Kerangka tersebut dikembangkan melalui kerja sama dengan *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre)*. Melalui kerja sama dengan *AHA Centre*, LSP PB dapat secara bersama-sama mengembangkan kurikulum dan modul-modul terkait proses standarisasi dan sertifikasi profesi dalam bidang

penanggulangan bencana.

Sampai saat ini, LSP PB bersama dengan *AHA Centre* telah berhasil melakukan penyetaraan kurikulum di kawasan ASEAN untuk jenis-jenis profesi sebagai berikut: *rapid assessment* (penilaian secara cepat); *emergency operation center* (pusat operasional darurat) termasuk pusat informasi, komunikasi serta koordinasi; dan *logistics management* (manajemen logistik). Untuk ke depannya, LSP PB bersama dengan badan-badan/organisasi-organisasi lainnya, seperti UNICEF berusaha untuk menyusun kurikulum mengenai *shelter operation* (manajemen tempat perlindungan) dan *logistic management* (manajemen logistik).

Bagaimana harapan Bapak ke depan terkait standarisasi dan sertifikasi profesi penanggulangan bencana?

Indonesia akan memiliki tenaga terampil yang bergerak di bidang penanggulangan bencana. Sehingga, dengan memiliki kompetensi tertentu dalam penanggulangan bencana, tidak akan mengakibatkan permasalahan dalam proses penanggulangan bencana.

(Argo Budi Prakoso/Dit. Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN)

wonderful indonesia

COLOR TREND 2017
SARIAYU
MARTHA TILAAAR

NEW Inspirasi
GILI LOMBOK
THE COLORS OF ASIA

NEW Innovation
Multifunction
Liquid Eyeshadow

INDONESIA TURUT
MEMPERCANTIK ASEAN

Industri kosmetik nasional merupakan salah satu industri yang strategis dan potensial. Saat ini terdapat 760 perusahaan kosmetik skala besar, menengah dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia. Keberadaannya mampu menyerap 75.000 tenaga kerja secara langsung dan 600.000 tenaga kerja secara tidak langsung di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada tahun 2015, penjualan produk kosmetik nasional mencapai 11 triliun rupiah atau sekitar 818 juta dolar AS. Tidak mengherankan jika industri kosmetik menjadi salah satu industri andalan nasional, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama perekonomian.

Sejumlah perusahaan kosmetika Indonesia saat ini telah merambah hingga pasar ASEAN. Salah satunya adalah *Martha Tilaar Group* (MTG). Berpegang pada filosofi *Local Wisdom Go Global* dan mengusung semangat *Beautifying Indonesia*, MTG kini juga eksis di berbagai negara, termasuk sejumlah negara anggota ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Kamboja.

Pada pertengahan Juli 2017, Redaksi MMA berkesempatan berbincang dengan Dr. (H.C) Martha Tilaar, pendiri MTG. Martha Tilaar mengisahkan bahwa mimpinya untuk mempercantik wanita Indonesia dan dunia dimulai sejak mengawali bisnis 47 tahun lalu dari sebuah salon

kecantikan di Jakarta. Hingga kini, perempuan kelahiran Gombong, 4 September 1937 tersebut masih aktif menjabat sebagai *Chairwoman* MTG.

Perbincangan juga berkisar pengalaman dan kiat suksesnya sebagai salah satu pengusaha wanita Indonesia yang berhasil merintis usaha dari bawah. Kiat pertama adalah penekanan pada riset dan teknologi. Tanpa dua hal tersebut, sulit untuk menghasilkan produk kecantikan unggulan yang dapat diterima masyarakat.

Kedua, kepercayaan diri. Ketika merintis di Indonesia, produk Martha Tilaar sering menerima penolakan karena masyarakat Indonesia punya kecenderungan



“Ketika merintis di Indonesia, produk Martha Tilaar sering menerima penolakan karena masyarakat Indonesia punya kecenderungan untuk berkiblat ke Amerika atau Eropa. Perlu kepercayaan diri tinggi untuk meyakinkan bahwa produk MTG tidak kalah berkualitas.”

untuk berkiblat ke Amerika atau Eropa. Perlu kepercayaan diri tinggi untuk meyakinkan bahwa produk MTG tidak kalah berkualitas. Terbukti kini mereka tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga berhasil ekspansi ke ASEAN. Sederet penghargaan pernah diraih Martha Tilaar. Salah satunya adalah penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma dari Presiden Joko Widodo, atas jasa-jasa dan kinerja Ibu Martha Tilaar dalam bidang pelestarian jamu dan herbal. Selama menjalankan bisnisnya, beliau senantiasa berupaya menggali dan melestarikan kekayaan alam dan budaya lokal, serta memperjuangkan agar produk-produk lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ia membuktikan bahwa mimpi



bisa menjadi nyata asalkan diiringi ketekunan, disiplin, kerja keras dan dedikasi yang tulus.

Melalui ekspansi MTG dan perusahaan kosmetika nasional lainnya ke pasar ASEAN, kini produk kosmetika Indonesia juga turut mempercantik ASEAN.

Pengalaman Martha Tilaar berkiprah dalam bisnis kosmetika dan kecantikan tentu sangat menarik untuk diketahui lebih lanjut. Dalam rangka mendukung peringatan HUT ke-50 ASEAN, Martha Tilaar menyatakan kesediaan menjadi salah satu narasumber **CEO Forum 2017: Sharing of Success Stories, Experiences and Best Practices** yang akan diselenggarakan pada **28 September 2017** di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri.

Kegiatan yang mengambil format *talkshow* itu diselenggarakan oleh Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-50 ASEAN. CEO Forum 2017 tidak dipungut dibiaya dan terbuka bagi umum, khususnya bagi kalangan pelaku usaha Indonesia yang ingin mengetahui kiat-kiat sukses untuk memasarkan produk Indonesia ke pasar ASEAN. Selain Martha Tilaar, *talkshow* tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari perusahaan Indonesia lainnya yang telah eksis di pasar ASEAN, seperti Alfamart, Grup Ciputra, Keabab Turki Baba Rafi dan PT. Dua Kelinci.

Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Sdri. Novia Indriani Mamuaja atau Sdr. Firmansyah Kustiawan

Sekretariat Ditjen Kerja Sama ASEAN
Gd. Utama Kementerian Luar Negeri Lt. 9
Jl. Taman Pejambon No. 6,
Jakarta Pusat 10110



Telp:

021-344 1508 ext. 4423 atau 350 9059



Fax:

021-350 9050



Email:

aseanceoforum@gmail.com



CEO FORUM 2017
SHARING OF
SUCCESS STORIES
EXPERIENCES & BEST PRACTICES
Jakarta, 28 September 2017

Telp 021 344 1508 ext. 4423 atau 350 9059
Email aseanceoforum@gmail.com

Reservasi Novia 0812 4999 0777
(*Tempat Terbatas)



TAMAN ASEAN PERTAMA, JOMBANG CATAT SEJARAH

Segecap unsur masyarakat dan pemerintah Kabupaten Jombang yang hadir pada upacara peresmian Taman ASEAN di Jombang, Jawa Timur menjadi saksi sejarah. “Jombang didapuk sebagai daerah pertama di Indonesia yang memiliki Taman ASEAN”, ungkap Isman Pasha, Kasubdit Kerja Sama Pembangunan Sosial, Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri di sambutannya pada acara peresmian Taman ASEAN dan pengibaran bendera ASEAN di Jombang, Jawa Timur (2/6).

“Kita tahu tokoh bangsa dan pendiri Nahdlatul Ulama juga lahir dan ada di Jombang. Untuk itu, tepat kiranya jika kami memperkenalkan kekuatan toleransi yang digagas para tokoh dari Jombang itu kepada para pemuda ASEAN,” jelas Bupati Jombang, Drs. Nyono Suharli Wihandoko yang hadir dan

menandatangani prasasti peresmian Taman ASEAN tersebut.

“Jombang punya sejarah panjang yang menjunjung tinggi dan menghormati keberagaman. Jombang menjadi laboratorium sekaligus contoh yang layak untuk diperlihatkan kepada masyarakat internasional sebagai pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” sambung Isman.

Peresmian Taman ASEAN tersebut diharapkan tidak berhenti hanya pada tataran seremoni. Kerja sama lebih nyata dari kerja sama dalam ruang lingkup ASEAN kiranya dapat lebih diarusutamakan oleh daerah-daerah di Indonesia, termasuk Jombang.

Dengan potensi jumlah tenaga kerja industri lebih dari 63 ribu jiwa, Jombang diharapkan mampu bersuara lebih di kancah ASEAN

yang kini sudah tidak lagi bersekat. Calon bidan dan perawat yang digembleng di 6 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan setempat kiranya dapat menjadi salah satu kunci masuk Jombang menuju pasar ASEAN. Untuk itu, dibutuhkan pembekalan lebih, seperti kemampuan Bahasa Asing guna meningkatkan daya saing tenaga kerja setempat.

Acara pengibaran bendera dan peresmian Taman ASEAN tersebut dihadiri oleh, diantaranya, jajaran pemerintah daerah, perwakilan DPRD Jombang, pihak kepolisian, TNI, pemuka agama, forum kerukunan umat beragama dan mahasiswa Jombang juga dari lintas agama. Kegiatan ini merupakan rangkaian pembuka menuju (*road to*) ASEAN *Youth Interfaith Camp 2017* (AYIC 2017) atau Kemah Lintas Kepercayaan Pemuda ASEAN yang akan diselenggarakan bulan Oktober 2017 di Jombang, Jawa Timur.

Dengan mengambil tema “*Tolerance in Diversity for a World Harmony*”, AYIC 2017 akan mengundang perwakilan pemuda dari negara anggota ASEAN dan mitra. Inisiatif ini merupakan kerja sama Kementerian Luar Negeri dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dan Pusat Studi ASEAN Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (PSA UNIPDU) Jombang Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 ASEAN yang jatuh pada tanggal 8 Agustus 2017

(Sumber: Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN)

MEMBANGUN STRATEGI PERTAHANAN CYBER DI ASEAN

Intensitas serangan *cyber* yang semakin tinggi, baik itu secara kuantitas dan kualitas, terjadi dalam konteks global berdampak pada kerugian yang bukan hanya dari segi ekonomi namun juga dari segi politis.

Seperti yang dilaporkan *The Telegraph UK*, pada bulan Mei 2017 lalu telah terjadi serangan *cyber* skala masif sepanjang sejarah pada tingkatan global. *WanaCryptor 2.0* atau yang biasa disebut sebagai virus *WannaCry* menyebar dengan cepat di Ukraina serta menyambar 10 negara lainnya hanya dalam waktu kurang dari dua jam, diantaranya yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, Taiwan, Rusia, Turki, Kazakhstan, Jepang, Spanyol, dan Jerman.

Menyusul kejadian tersebut, mengacu pada sumber *The Economist* pada bulan Juni 2017, ditemukan *malicious software* bernama *NotPetya* yang telah merusak setidaknya 10.000 jaringan komputer di beberapa negara, termasuk Ukraina dan Rusia. Peneliti keamanan mengungkapkan bahwa motif dari serangan *cyber* tersebut adalah sabotase dan *chaos*, yang merupakan tindakan non-profit.

Ancaman 'Modern' bagi Keamanan Regional

Isu keamanan regional, domain *cyber* cenderung disepelkan jika dibandingkan domain pertahanan lainnya seperti domain darat, laut, dan udara. Seiring dengan perubahan zaman, sudah saatnya bagi ASEAN untuk menyadari bahwa pada era keterbukaan informasi kini, bentuk-bentuk ancaman pertahanan dan keamanan sudah berevolusi menjadi kian modern sehingga diperlukan perencanaan dan penanganan khusus.

Nyatanya, ketika ASEAN sudah semakin bergantung dengan sistem jaringan protokol internet maka peluang ancaman *cyber* pun semakin tinggi. Mengacu pada sumber *FireEye* pada tahun 2015, terungkap bahwa terdapat kelompok *hacker*, menamakan dirinya *Advanced Persistent Threat (APT30)*, yang memiliki akses terhadap informasi penting ASEAN selama bertahun-tahun.

Berkaitan dengan hal itu, serangan *cyber* kini menjadi isu yang relevan untuk dibahas sebagai isu keamanan regional yang harus diprioritaskan karena sifatnya yang sangat destruktif sehingga dapat mengancam keamanan dari sistem jaringan informasi strategis pada kawasan regional ASEAN. Hal yang menjadi penting untuk

diketahui bahwa pada isu serangan *cyber*, ada yang dikenal sebagai istilah '*worm*', yakni dimana ketika suatu *malware* telah menginfeksi satu komputer maka ia akan mereplikasi sekaligus menyebarkan dirinya sendiri melalui jaringan komputer yang saling terkoneksi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, perencanaan strategi pertahanan *cyber* kawasan ASEAN harus direncanakan secara lebih matang untuk menghindari berbagai kerugian yang ditimbulkan dari serangan *cyber* yang sifatnya *borderless*, *anonymous*, dan *real-time*.

Fokus Cyber di ASEAN sebatas ekonomi

Berkaitan dengan masalah yang dihadapi dalam menciptakan keamanan *cyber*, gejala yang terlihat adalah upaya membangun keamanan *cyber* antar negara ASEAN yang belum dapat dikatakan berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan belum ditemukannya mekanisme hukum, serta adanya perbedaan kapabilitas, dan prioritas, dalam konteks kesadaran akan ancaman *cyber*. Tidak semua negara anggota merasa bahwa isu ancaman *cyber* merupakan prioritas keamanan nasional.



**Melirik Pertahanan
Cyber Uni Eropa**

Tidak dapat dipungkiri bahwa ASEAN perlu belajar dari negara lain yang telah lebih dulu menyadari pentingnya membangun strategi kerja sama regional dalam menghadapi isu keamanan *cyber* yang mengancam keamanan dan stabilitas politik suatu kawasan. Sejak tahun 2013, Uni Eropa memahami betul kerentanan dari pertahanan keamanan *cyber* regional. Salah satu isu strategis prioritas yang berusaha untuk dicapai yakni pengembangan kebijakan pertahanan *cyber* terkait *Common Security and Defence Policy (CSDP)*. Pada tahun 2016, Uni Eropa dan NATO berkolaborasi untuk tujuan peningkatan keamanan *cyber* regional.

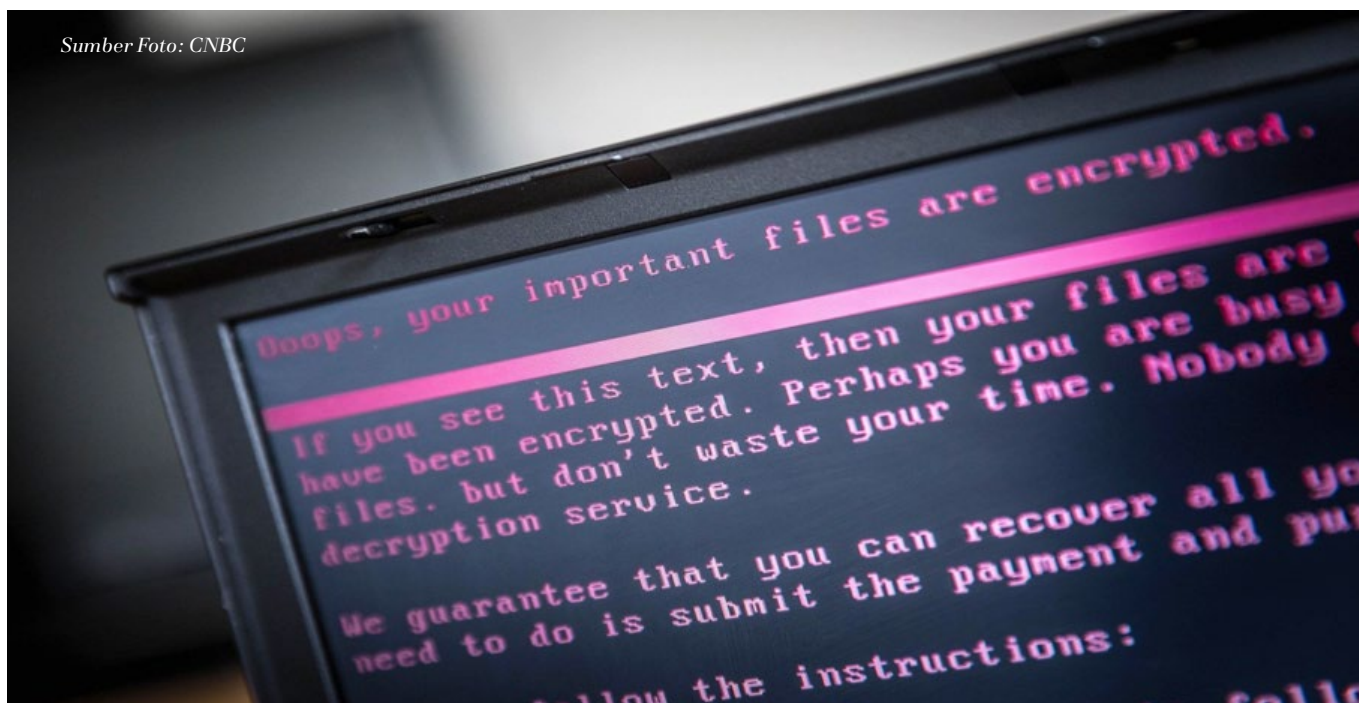
Memastikan terciptanya *capacity building* merupakan prinsip dasar Uni Eropa dalam rangka mengembangkan dan memajukan strategi keamanan *cyber* tingkat regional. Untuk dapat mengadopsi pendekatan *high-level top-down* yang diusung, bukan hanya sektor publik, sektor privat pun berperan besar dalam rangka percepatan pencapaian tujuan keamanan *cyber*. Secara khusus, sektor privat dilibatkan dalam

Gambaran besar mengenai isu keamanan *cyber* ASEAN yaitu adanya masalah dalam proses perencanaan keamanan dan pertahanan *cyber*, sehingga arah strategi kebijakannya ASEAN belum terlihat jelas mau dibawa kemana.

Celah terbesar dari isu keamanan *cyber* ASEAN yaitu tidak terintegrasinya proses perencanaan keamanan *cyber* dengan perencanaan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Mengacu pada *ASEAN ICT Masterplan Report* pada tahun 2015, pemanfaatan infrastruktur TIK di tingkat regional cenderung dikembangkan hanya

untuk menunjang kegiatan dan kerja sama negara anggota ASEAN pada bidang ekonomi (*e-commerce*). ASEAN belum memfokuskan perencanaannya dalam bidang TIK untuk membangun kapasitas kerja sama pertahanan *cyber* regional. Antara perencanaan keamanan *cyber* dan TIK tersebut cenderung berjalan secara terpisah. Hal tersebut sangat disayangkan karena dalam konteks membangun mekanisme pertahanan *cyber*, maka dibutuhkan kapasitas infrastruktur TIK yang memadai melalui proses perencanaan yang terintegrasi.

Sumber Foto: CNBC



pengupayaan tindakan preventif untuk mendeteksi ancaman *cyber*.

Pada level Uni Eropa, kolaborasi antara sektor publik-privat, atau yang dikenal dengan *Public-Private Partnership* (PPP), telah menjadi alat yang paling efektif dalam mendorong proses terciptanya *cybercapacity building* dan inovasi pada industri keamanan *cyber*.

Bentuk kolaborasi sektor publik-privat yang dilakukan yaitu dengan melibatkan berbagai aktor pemerintahan serta aktor swasta, mulai dari penyedia perangkat lunak (*software providers*), *internet service providers*, dan *security researchers* untuk menciptakan mekanisme strategi pertahanan *cyber*. Kolaborasi tersebut merupakan bentuk kombinasi dari upaya koordinasi Uni Eropa dalam rangka meminimalisir hambatan pertahanan *cyber* yang sifatnya legal dan teknis.

Rencana Strategi Jangka Pendek-Panjang

Dalam rangka membangun strategi pertahanan *cyber* pada tingkatan regional maka dibutuhkan pendekatan yang lebih komperhensif dan terintegrasi satu sama lainnya, sehingga yang diperlukan bukan hanya perencanaan jangka pendek, namun juga jangka panjang. Strategi jangka pendek yang dapat dilakukan terlebih dahulu yaitu dengan meningkatkan dialog terkait keamanan dan pertahanan *cyber* antar negara ASEAN. Dialog akan sangat berguna dalam menentukan arah dan strategi kerjasama *cyber* ASEAN. Upaya ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan *capacity building* dan *confidence building measure*.

Forum dialog seperti *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus), *ASEAN Regional Forum*

(ARF), *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), dan *Senior Officials' Meeting on Transnational Crime Working Group on Cybercrime* (SOMTC) dapat dimanfaatkan secara lebih teknis sebagai suatu bentuk koordinasi pertahanan *cyber* pada tingkat regional.

Adapun tantangan terkait strategi ini adalah konsensus antar negara serta upaya untuk menyatukan pandangan mengenai visi-misi dan prioritas keamanan nasional. Hal ini masih menjadi salah satu agenda besar yang hingga kini terus diupayakan.

Selain itu, strategi jangka panjang yang ditawarkan yakni dengan membuat mekanisme perencanaan infrastruktur pertahanan *cyber* berupa *security network* yang terintegrasi dengan perencanaan TIK (*ASEAN ICT Masterplan*) yang dimiliki ASEAN.

Perencanaan infrastruktur TIK yang dimaksud adalah diperlukannya perluasan pemanfaatan TIK, bukan hanya dalam bidang ekonomi, namun juga dalam bidang pertahanan cyber. Dalam mengupayakan terciptanya mekanisme *security network* yang baik maka dibutuhkan peran dari berbagai *stakeholder* yang memiliki kemampuan dalam bidang pertahanan cyber. Melalui dukungan kerjasama dengan negara-negara diluar ASEAN, melalui ARF misalnya, ASEAN memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya (*cybercapacity building*) dalam membangun mekanisme *security network*.

Tantangan terbesar dalam merealisasikan perencanaan mekanisme *security network* pada level ASEAN yaitu adanya *digital divide*. Masih ditemukannya kesenjangan *gap* dalam bidang TIK antar negara ASEAN berpeluang menciptakan terhambatnya proses-proses perealisasi rencana pembangunan infrastruktur pertahanan cyber regional.

Sebagai lanjutan dari strategi jangka panjang, ASEAN juga perlu memiliki visi kedepan dalam melihat peluang kerjasama dengan menggandeng sektor privat. Kolaborasi publik-privat dapat dijadikan sebagai salah satu alat percepatan pengupayaan mekanisme keamanan cyber sekaligus percepatan proses *capacity building* dalam pemanfaatan infrastruktur TIK untuk pertahanan cyber.

Kerjasama dengan sektor privat dapat menjadi salah satu jawaban dalam menanggapi keterbatasan ASEAN dalam mengembangkan mekanisme infrastruktur pertahanan cyber regional. Kontribusi sektor privat yang mungkin untuk dilakukan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dan pertukaran informasi.

Merencanakan Pertahanan Cyber ASEAN secara Holistik

Meminjam istilah perencanaan sosial, dalam konteks mengatasi isu keamanan cyber ASEAN, kata kuncinya terdapat pada perencanaan holistik. Proses perencanaan infrastruktur TIK dan perencanaan keamanan cyber ASEAN perlu diupayakan agar berjalan beriringan sehingga strategi pertahanan cyber dari sekian banyak dialog yang telah dilakukan ASEAN dapat membuahkan hasil.

Proses perencanaan secara holistik diibaratkan sebagai mesin penggerak strategi pertahanan cyber ASEAN. Adapun alur mekanisme dari rencana strategi jangka pendek-panjang pertahanan cyber ASEAN dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Input*, yaitu berupa penyelenggaraan forum dialog mengenai agenda keamanan cyber ASEAN kedepannya;
2. *Process*, yaitu hasil dari dialog berupa konsensus dan pengupayaan bentuk kerja sama;
3. *Output*, yaitu rencana jangka pendek atau menengah berupa pembuatan mekanisme infrastruktur *security network* ASEAN yang terintegrasi; dan
4. *Outcome*, yaitu rencana jangka panjang keamanan cyber berupa kerjasama ekstra-regional melalui kolaborasi sektor publik-privat.

(Sabrina Burhanuddin/SI Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia)





“UPGRADE MIMPI, ANAK MUDA INDONESIA KUASAI MASA DEPAN ASEAN”

Siapa yang tidak kenal Daniel Mananta? Akrab dipanggil Daniel, *entertainer* dan *entrepreneur* ini mencuat namanya setelah menjadi juara pemilihan *host* acara musik di tahun 2003. Ia memiliki sebuah merk produk *fashion* ternama, “*Damn, I Love Indonesia*”. Produk-produknya membawa unsur budaya lokal yang bertujuan menumbuhkan rasa patriotisme.

Daniel ditemui setelah memberikan presentasi di acara *International Scale Up Boot Camp* yang diselenggarakan oleh *Ciputra Entrepreneurship Center* dan Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri. Ia menyampaikan bahwa sebuah bisnis harus memiliki *purpose* serta punya *impact* yang membawa dampak positif bagi dunia.

Produk kaos dipilih Daniel karena merupakan bisnis yang digeluti keluarganya. Bisnis ini telah menghidupi Daniel dan keluarganya hingga bisa besar seperti sekarang. Daniel menyampaikan, “Gue pilih bisnis ini karena keluarga Gue udah jualan kaos dari dulu. Kalo artis sekarang jualan macem-macem, Gue pilih kaos karena Bokap Gue banyak kasih ilmu ke Gue.”



“ASEAN sudah 50 tahun, be part of the history, unite ASEAN together and create unity.”

Dalam menjalankan bisnisnya, sama seperti produk yang lain, tentunya pernah mengalami pasang surut. Daniel menyampaikan, meskipun di tengah terpaan kelesuan ekonomi, *“Damn, I love Indonesia”* hingga saat ini belum pernah memecat pegawainya karena permasalahan keuangan.

Ketika ditanya soal ASEAN, Daniel menjawab bahwa ASEAN merupakan pasar yang potensial. Dengan 620 juta

penduduk, tentu lebih baik dari 250 juta jiwa saja. Sebagai sebuah merk, produk *“Damn, I love Indonesia”* yang saat ini telah memiliki 11 cabang toko di Indonesia direncanakan akan masuk pasar Thailand dan Filipina. Produk ini diharapkan akan menjadi produk fashion pertama yang mampu menyatukan pasar ASEAN.

Dalam menghadapi Masyarakat ASEAN, Daniel mengajak kaum muda untuk menghadapinya dengan

mindset yang positif. Anak muda Indonesia tidak perlu takut akan dibanjiri pekerja asing, justru anak muda Indonesia bisa mendunia dan berkarir secara global.

Di akhir perjumpaan, Daniel menyampaikan pesan bagi 50 tahun ASEAN.

“ASEAN sudah 50 tahun, be part of the history, unite ASEAN together and create unity.”

(Thalita Hindarto/Setditjen KSA)



The ASEAN Golden Jubilee Symposium, Reviewing ASEAN Centrality and Unity: Strategic Role of ASEAN in the Maintenance of Regional Stability, Jakarta, 13-14 Juli 2017



Dirjen KSA menjadi panelis pada acara Seminar on the 50th Anniversary of ASEAN: Development of ASEAN from Japanese Point of View, di Jakarta pada 26 Juli 2017. Seminar hasil kerja sama CSIS Indonesia dengan Misi Jepang untuk ASEAN.



Dirjen KSA menjadi narasumber pada acara Seminar ASEAN 50: A New Chapter for ASEAN-China Relations di Jakarta tanggal 14 Juli 2017. Seminar tersebut merupakan kerja sama PSA UI dengan Misi China untuk ASEAN.



BELAJAR ASEAN SAMBIL BERSENANG-SENANG DI MATASORA WORLD MUSIC FESTIVAL 2017

Siapa bilang belajar tentang ASEAN itu selalu serius? Belajar tentang ASEAN bisa juga dilakukan sambil bersenang-senang bersama teman dan keluarga!

Untuk merangkul lebih banyak kalangan dalam mempelajari dan memahami ASEAN, Kemlu mengadakan pameran informasi ASEAN pada *Matasora World Music Festival 2017* yang diselenggarakan di Gudang Persediaan KAI, Bandung pada tanggal 22-23 Juli 2017.

Matasora World Music Festival 2017 merupakan festival musik dan

seni yang diselenggarakan secara tahunan. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai budaya melalui rangkaian kegiatan yang mendukung interaksi multikultural, serta rural and *sustainable lifestyle*.

Rangkaian acara *Matasora World Music Festival 2017* terdiri dari konser musik, *dance workshop*, *world culinary bazaar*, instalasi seni, dan *street performance*. Musisi yang memeriahkan festival ini berasal dari





“ASEAN Corner mendapat sambutan yang baik dari para pengunjung dari berbagai kalangan seperti seniman, pemuda, anak-anak serta orang tua.”

berbagai daerah di Indonesia (Sunda, Bali, Jawa Barat, Batak dan Melayu) serta dari mancanegara seperti Taiwan, Inggris, India, Ekuador, Norwegia, Thailand, dan Perancis. Pada festival ini, Kemlu membuka booth ASEAN Corner dan mengajak pengunjung untuk belajar mengenai ASEAN melalui cara yang menyenangkan. Para pengunjung dapat membaca informasi umum mengenai ASEAN serta ikut berpartisipasi dalam ASEAN Quiz yang menguji wawasan masyarakat umum mengenai ASEAN. Saat mengikuti ASEAN Quiz, peserta diharuskan memutar Lucky Wheel

untuk mendapatkan pertanyaan umum seputar ASEAN. Peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar mendapatkan hadiah berupa souvenir ASEAN seperti kaos dan goodie bag.

ASEAN Corner mendapat sambutan yang baik dari para pengunjung dari berbagai kalangan seperti seniman, pemuda, anak-anak serta orang tua. Para pengunjung menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap ASEAN. Antusiasme dan sambutan hangat itu dibuktikan dengan ramainya pengunjung ASEAN Corner serta banyaknya antrian pengunjung

yang ingin mengikuti ASEAN Quiz dan menguji pengetahuan mereka tentang ASEAN. Para pengunjung sangat tertarik dan bersemangat untuk mencari informasi seputar ASEAN dalam cara yang santai dan menghibur.

(Lindi Mahesi/Dit. Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN)

Pemberian cinderamata dari Pusat Studi ASEAN Universitas Gadjah Mada oleh Dr. Erwan Agus Purwanto, M. Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada kepada H.E. Ambassador Ong Keng Yong, mantan Sekretaris Jenderal ASEAN



PEMUDA ASEAN BICARA *DIGITAL DIPLOMACY*

Dua puluh empat pemuda dari negara-negara anggota ASEAN berkumpul di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mengikuti *ASEAN Youth Initiative Empowerment Program* (AYIEP). Kegiatan bertemakan “*Digitalizing ASEAN: Fostering Community through Digital Diplomacy*” berlangsung selama 1 (satu) minggu dari tanggal 23-29 Juli 2017. Acara ini dibuka oleh Dekan FISIPOL UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto, yang didampingi oleh Direktur Pusat Studi ASEAN UGM, Dr. Dafri Agussalim.

“Pemberdayaan pemuda merupakan suatu usaha penting bagi penyelesaian masalah sosial dan politik yang kompleks di ASEAN. Pendayagunaan teknologi, komunikasi, dan teknologi merupakan salah satu cara yang tepat dan dapat digunakan untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Sehingga pemilihan tema utama AYIEP tahun ini “*Digitalizing ASEAN: Fostering Community through Digital Diplomacy*” merupakan kontribusi nyata Pusat Studi ASEAN UGM untuk lebih menguatkan integrasi ASEAN melalui pemberdayaan pemuda dan ICT”, ujar Dr. Dafri Agussalim, Kepala Pusat Studi ASEAN UGM.

Apa saja kah yang dilakukan pemuda dalam kegiatan AYIEP? Rangkaian kegiatan AYIEP 2017 mencakup Kuliah Umum, Seminar Internasional, *Working Group*, serta kunjungan ke beberapa tempat, seperti *Jogja Digital Valley*, *Innovative Academy*, dan *Kampung Cyber Yogyakarta*. Kunjungan ini dilakukan ke pusat-

pusat inkubator bisnis digital di Yogyakarta dan pusat komunitas masyarakat ramah digital. Selain diikuti oleh peserta dari negara-negara anggota ASEAN, AYIEP 2017 juga diikuti oleh peserta dari Uganda, Mesir, dan Jepang.

Acara AYIEP 2017 merupakan kerja sama Pusat Studi ASEAN Universitas Gadjah Mada dengan Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Kementerian Luar Negeri dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 ASEAN. Kegiatan AYIEP menghadirkan beberapa tokoh penting di balik proses integrasi ASEAN selama ini, seperti H.E. Ambassador Ong Keng Yong (Sekretaris Jenderal ASEAN 2003-2007), Duta Besar Foster Gultom (Mantan Duta Besar RI untuk Kazakhstan), dan Duta Besar Djauhari Oratmangun (Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI). Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan Stuart Shaw (Misi Kanada Untuk ASEAN), Alfatih Timur (CEO *kitabisa.com*) dan



Makshud Manik (CEO *youthop.com*). Kegiatan AYIEP bertujuan untuk menambah *awareness* masyarakat ASEAN terhadap berkembangnya platform digital, agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung integrasi. “Ada tiga elemen penting dari integrasi digital ASEAN yang kami dorong di kegiatan ini, yaitu diplomasi digital, aktivisme digital, dan kewarganegaraan digital. Kami berharap kegiatan kami berkontribusi untuk masa depan ASEAN yang lebih baik,” jelas Ahmad Rizky M. Umar, Sekretaris Eksekutif Pusat Studi ASEAN UGM.

(Fatimah Alatas/Dit. KSBA)



INDONESIA RAYAKAN 50 TAHUN ASEAN

Pendirian ASEAN ditandai melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Eksistensi ASEAN selama lima puluh tahun terakhir menunjukkan dinamika yang sangat signifikan. Bermula dari kerja sama yang berorientasi pada pemerintah, ASEAN beralih menjadi organisasi regional yang berpusat dan bertumpu pada rakyat (*people centered and people-oriented*).

Pada usia emasnya, semakin penting untuk menekankan bahwa ASEAN sungguh dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Untuk itu, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, agar ASEAN tidak bersifat eksklusif dan elitis melainkan menjadi milik seluruh rakyat.

Dalam rangka semakin menumbuhkan pemahaman dan rasa kepemilikan masyarakat Indonesia terhadap ASEAN, serangkaian kegiatan diselenggarakan Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-50 ASEAN.

Lighting of Iconic Landmark

Menjelang 8 Agustus 2017, Negara-Negara Anggota ASEAN sepakat untuk menerangi bangunan ikonik di

wilayahnya masing-masing dengan pencahayaan warna warni sesuai yang terdapat pada logo ASEAN.

Tugu Monas merupakan bangunan ikonik yang dipilih Indonesia sebagai lokasi pencahayaan. Pada periode **1-16 Agustus 2017**, mulai **pukul 18.00 WIB**, warga dapat menyaksikan cahaya biru, merah dan kuning menerangi Monas. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Merah melambangkan keberanian dan dinamisme, sedangkan kuning melambangkan kemakmuran.

Selain Monas, juga dilakukan pemasangan dua set *landmark* di sekeliling Bundaran Hotel Indonesia. *Landmark* ini berwarna putih, dengan tinggi 130 cm dan tebal 100 cm, bertuliskan **#ASEAN50**. Periode pemasangan kedua *landmark* tersebut adalah pada tanggal **1-13 Agustus 2017**.

Situasi Menjelang 50 Tahun ASEAN di Bundaran HI





Pencahayaian Tugu Monas dengan Warna ASEAN



Barisan Pembuka Parade ASEAN 50 (Sumber Foto: Setditjen KSA)



Parade ASEAN 50

Memanfaatkan momentum Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) pada hari Minggu, 27 Agustus 2017, dilaksanakan kegiatan Parade ASEAN 50. Bermula dari Silang Monas hingga ke Jalan Imam Bonjol, sebanyak lebih dari 3000 peserta ikut dalam parade tersebut. Para peserta tidak hanya berasal dari komunitas, organisasi, sekolah, perusahaan dan kementerian di Indonesia, tetapi juga dari negara-negara ASEAN, Mitra Wicara ASEAN dan Sekretariat ASEAN.

Parade ASEAN 50 yang dilepas oleh Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi dan Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Loung Minh merupakan



Menlu dan Sekjen ASEAN meresmikan pembukaan Parade ASEAN 50 (Sumber Foto: Setditjen KSA)

bagian dari perayaan ulang tahun ke-50 ASEAN. Parade ini diharapkan dapat menjadi pameran suatu keluarga besar ASEAN yang beragam namun satu dalam mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran, keamanan dan stabilitas kawasan.

Kegiatan ini menampilkan berbagai keunikan dan penampilan, seperti parade bendera ASEAN, parade kostum, parade tari dan gerak musik dan sebagainya.



Barisan salah satu peserta Parade ASEAN 50 (Sumber Foto: Setditjen KSA)



Para undangan VIP di panggung utama (Sumber Foto: Setditjen KSA)



Menlu berfoto dengan para volunteers Parade ASEAN 50 (Sumber Foto: Setditjen KSA)

Kemeriahan Parade ASEAN 50 diharapkan dapat semakin mendekatkan masyarakat Jakarta dengan ASEAN dan semakin mengukuhkan Jakarta sebagai ibukota diplomatik Asia Tenggara. Keterlibatan lebih dari 600 orang relawan yang sebagian besar adalah dari kalangan mahasiswa dan pekerja usia muda menunjukkan antusiasme generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan ASEAN.

Foto 1, 2, 3, 4: Partisipasi berbagai komunitas dalam Parade ASEAN 50 yang diabadikan oleh Fotografer Muhamad Irfan, [instagram@irfantraveller](#) FG Traveller Community





Foto 3



Foto 4

Sebagaimana diungkapkan oleh Fernanda Gunawan salah seorang relawan Parade ASEAN 50, “Merupakan suatu kebanggaan dapat berpartisipasi dalam acara yang melibatkan komunitas masyarakat dari berbagai negara ini.” Mahasiswa Fakultas Hukum

tersebut juga menambahkan, “Dengan melihat bermacam-macam budaya dari berbagai negara di ASEAN tentu membuat mata rakyat terbuka akan indahnya persatuan dalam keberagaman”. Ia juga menyampaikan harapannya agar acara Parade ASEAN 50 membuat

negara-negara di ASEAN semakin erat dalam bekerjasama dan membuktikan kepada dunia bahwa ASEAN mampu menjadi organisasi regional yang menjaga stabilitas kawasan.



Para mahasiswa yang merupakan sebagian dari sukarelawan Parade ASEAN 50



Pemberian hadiah kepada para pemenang ASEAN Photo Contest dan ASEAN Vloggers Competition 2017 oleh Menteri Luar Negeri RI pada saat Parade ASEAN 50, di Jakarta pada 27 Agustus 2017.

ASEAN 50 dan hadiah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI.

Untuk melihat foto dan video peserta kontes dapat dilakukan dengan mencari kata kunci **#ASEANadalahkita** pada situs *Instagram* dan *Youtube*.

Untuk merangkul pemuda yang aktif di media sosial dan menyambut HUT ASEAN yang ke-50, Ditjen Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan *ASEAN Photo Contest* dan *ASEAN Vloggers Competition 2017*.”

ASEAN Photo Contest dan ASEAN Vloggers Competition 2017

Untuk merangkul pemuda yang aktif di media sosial dan menyambut HUT ASEAN yang ke-50, Ditjen Kerja Sama ASEAN menyelenggarakan *ASEAN Photo Contest* dan *ASEAN Vloggers Competition 2017*.

Untuk *ASEAN Photo Contest*, peserta diminta mengunggah foto bertemakan ASEAN pada akun *instagramnya*. Sedangkan untuk *ASEAN Vloggers Competition*, peserta diminta mengunggah video blog mengenai ASEAN ke akun *youtube*.

Pengumuman pemenang kedua kontes ini dilakukan pada saat Parade



Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, Mayerfas, menyampaikan kata sambutan pembuka Malam Final Pemilihan Duta Muda ASEAN-Indonesia 2017 (Sumber foto: Dit. Infomed)



Para Juri Malam Final Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 (kiri ke kanan): Reza Rahadian, Wulan Tilaar, Jose Tavares, Najwa Shihab, Tyovan Widagdo (Sumber Foto: Dit. Infomed)

Malam Final Pemilihan Duta Muda ASEAN-Indonesia 2017

Masih dalam rangkaian peringatan ulang tahun ASEAN ke-50, Kementerian Luar Negeri menggelar acara Malam Final Pemilihan Duta Muda ASEAN- Indonesia 2017 di Balai Sarbini, Jakarta pada 29 Agustus 2017.

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Mayerfas, menyampaikan bahwa ada harapan yang sangat besar kepada Duta Muda ASEAN ini. “Saya menaruh harapan ke Duta Muda ASEAN agar menjadi *role model*, aktivis dan perekat persaudaraan sesama pemuda ASEAN, juga membantu sosialisasi dengan pemuda ASEAN lainnya,” ujar Mayerfas dalam sambutannya

mewakili Menteri Luar Negeri RI yang berhalangan hadir.

Sebanyak 736 peserta dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua Barat turut menyemarakkan Pemilihan Duta Muda ASEAN-Indonesia (PDMAI) 2017. Setelah melewati penjurian yang terdiri dari 3 tahapan, terpilih 50 finalis dari 30 provinsi di Indonesia, termasuk Papua.

Tahap I merupakan penulisan esai dan setiap peserta diminta menyiapkan tulisan dalam bentuk esai 1000 kata dengan pilihan tema “Jika Aku Menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN” dan “Sebagai Duta ASEAN, Apa Arti ASEAN untuk Kamu dan Apa Yang Kamu Harapkan dari ASEAN”.

Selanjutnya, sebanyak 200 orang dipilih untuk masuk ke seleksi tahap

“Saya menaruh harapan ke Duta Muda ASEAN agar menjadi *role model*, aktivis dan perekat persaudaraan sesama pemuda ASEAN, juga membantu sosialisasi dengan pemuda ASEAN lainnya,”

II yang merupakan babak pembuatan video berdurasi 1-2 menit dalam bahasa Inggris dan diunggah di media sosial.

Tahap III yang merupakan tahap final. Sebanyak 50 finalis yang lolos dalam tahap ini diundang ke Jakarta untuk mengikuti proses pembekalan materi yang berlangsung pada tanggal 23-28 Agustus 2017. Berbagai materi disampaikan kepada para finalis yang mencakup isu-isu ASEAN hingga *public speaking*.

Puncaknya, pada malam final, para finalis diuji oleh Dewan Juri yang terdiri dari lima orang, yaitu: Jose Tavares (Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN), Wulan Tilaar (*Vice Chairwoman Martha Tilaar Group*), Reza Rahadian (UNDP *Indonesia SDGs Mover*), Najwa Shihab (*News Presenter*) dan Tyovan Widagdo (CEO Bahaso, *Forbes 30 under 30*).

Setelah melewati proses penjurian yang ketat, terpilihlah Westra Tanribali dari DKI Jakarta sebagai Juara I dan Scholastika Asyana dari DI Yogyakarta sebagai Juara II Duta Muda ASEAN-Indonesia 2017.

Duta Muda ASEAN-Indonesia terpilih diharapkan menjadi agen diseminasi dan menularkan semangat ASEAN kepada masyarakat dan kaum muda guna meningkatkan

manfaat ASEAN dalam momentum hari jadi ASEAN yang ke-50.

Setelah terpilih sebagai Juara I Duta Muda ASEAN Indonesia 2017, Westra Tanribali mengungkapkan kesan dan harapannya. “Tentunya sangat senang atas dipercayakannya gelar Duta Muda ASEAN Indonesia ini pada saya. Di sisi lain, saya juga merasa ada tanggung jawab besar yang diamanatkan pada saya untuk membuat ASEAN lebih dekat pada masyarakat, khususnya anak muda, dan meningkatkan kontribusi anak muda pada pencapaian visi ASEAN. Sebagai Duta Muda ASEAN Indonesia, saya juga berharap dapat memberikan yang terbaik atas tindakan dan sikap saya, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Westra juga berpesan, “Perjuangan untuk mendekatkan ASEAN pada masyarakat ini bukan hanya menjadi tugas saya sendiri, tetapi juga ke-49 Duta Muda lainnya. Kami sedang dan akan terus memberikan program-program terbaik yang bertujuan pada meningkatnya pemahaman mengenai ASEAN untuk berbagai kalangan, baik siswa sekolah, mahasiswa, pelaku UMKM bahkan ibu rumah tangga. Semoga apa yang kami lakukan dapat didukung terus oleh pemerintah dan masyarakat, bahkan besar



Para finalis Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 terdiri dari 50 putra putri dari seluruh Indonesia (Sumber foto: Setditjen KSA)



Westra Tanribali (Juara I) dan Scholastika Asyana (Juara II) Final Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 (Sumber Foto: Muhamad Irfan, instagram@irfantraveller FG Traveller Community)



Para Finalis Duta Muda ASEAN – Indonesia 2017 (Sumber Foto: Setditjen ASEAN)



Para Finalis Duta Muda ASEAN – Indonesia 2017 (Sumber Foto: Setditjen ASEAN)

Acara Malam Final Pemilihan Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 dipadati sekitar 1300 penonton (Sumber foto: Setditjen KSA)



Suasana tribun penonton pada Malam Final Duta Muda ASEAN Indonesia 2017



harapan kami untuk dapat menjadi inspirasi dan contoh bagi anak muda lainnya dalam menciptakan gerakan kepemudaan serupa.”

Kehadiran para penonton dalam acara Malam Final Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 turut memeriahkan acara tersebut. Tribun penonton yang berkapasitas 1300 kursi dipenuhi oleh kehadiran mereka yang ingin menyaksikan dan mendukung finalis Duta Muda ASEAN Indonesia 2017 yang menjadi jagoannya.

Annisa Putri Tri Handayani, mahasiswi dari Bogor, merupakan salah seorang penonton yang hadir. Ia memberikan kesannya terhadap acara tersebut, “Acara ini sangat menarik dan dapat menginspirasi anak-anak muda untuk

meningkatkan kepedulian mereka terhadap isu-isu di negara-negara ASEAN. Saya sangat mengapresiasi Kementerian Luar Negeri karena merangkul semua kalangan dan memberi kesempatan kepada pemuda dan pemudi Indonesia dalam mengekspresikan pendapatnya melalui ajang ini. Melalui acara ini,

kaum muda semakin memahami dan menambah wawasan tentang ASEAN serta manfaatnya. Semoga acara ini dapat dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya dan Duta Muda ASEAN Indonesia menjadi teladan bagi kaum muda di Indonesia dan ASEAN.”

Konferensi Setnas ASEAN-Indonesia dan Pusat Studi ASEAN

Untuk pertama kali interaksi langsung antara Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN - Indonesia dan Pusat Studi ASEAN (PSA), membahas dan bertukar pikiran mengenai kerja sama ASEAN yang melibatkan pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga dan Perguruan Tinggi dari berbagai provinsi di tanah air. Kegiatan ini berlangsung pada 30-31 Agustus 2017

di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI.

Mengambil tema “Merumuskan Langkah-Langkah Strategis Menghadapi Penguatan Integrasi Masyarakat ASEAN Tahun 2025”, hari pertama kegiatan diisi dengan paparan 6 (enam) rekomendasi kebijakan oleh PSA terkait kajian kerja sama ASEAN di bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Paparan tersebut disampaikan oleh PSA Universitas Andalas, Universitas Indonesia,

Universitas Mulawarman, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Siliwangi. Saat ini, PSA telah tersebar di 40 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Ambon.

Pemaparan rekomendasi kebijakan PSA terkait kerja sama ASEAN di bidang Politik dan Keamanan.

Pada kesempatan ini, juga dilaksanakan peluncuran laman (*website*) Setnas ASEAN - Indonesia secara resmi. Laman ini merupakan

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, Bapak Mayerfas menyampaikan sambutan pembukaan acara Konferensi Setnas ASEAN-Indonesia dan Pusat Studi ASEAN (Sumber foto: Dit. Infomed)





Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI diwawancarai oleh pers sesuai acara pembukaan Konferensi Setnas ASEAN-Indonesia dan Pusat Studi ASEAN, 30 Agustus 2017 (Sumber foto: Dit. Infomed)

salah satu wujud implementasi dari tugas dan fungsi Setnas ASEAN sesuai Keppres No. 23 Tahun 2012, antara lain

- (a) menjadi penyimpan informasi mengenai semua urusan ASEAN pada tingkat nasional dan
- (b) memajukan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional.

Laman Setnas ASEAN – Indonesia (setnas-asean.id) menjadi sarana

komunikasi, sosialisasi, edukasi dan advokasi tentang ASEAN diantara Kementerian/Lembaga anggota Setnas ASEAN – Indonesia dan masyarakat umum. Tidak hanya isu-isu kerja sama ASEAN yang dikelola Kementerian/Lembaga anggota Setnas ASEAN-Indonesia, laman ini juga menampilkan informasi kegiatan PSA.

Informasi yang ditayangkan diharapkan dapat meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat

terhadap kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dalam kerangka ASEAN.

Pada hari kedua (31 Agustus 2017), kegiatan diisi dengan *Coaching Clinic* penyusunan proposal dalam rangka pemanfaatan *ASEAN Trust Fund* dan *Project Fund* untuk Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Pusat Studi ASEAN seluruh Indonesia.

“Mengambil tema “Merumuskan Langkah-Langkah Strategis Menghadapi Penguatan Integrasi Masyarakat ASEAN Tahun 2025”, hari pertama kegiatan diisi dengan paparan 6 (enam) rekomendasi kebijakan oleh PSA terkait kajian kerja sama ASEAN di bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya.”

Melalui kegiatan *coaching clinic* ini, PSA diharapkan akan semakin aktif dalam memanfaatkan *Trust Fund* dan *Project Fund* untuk melaksanakan beragam kegiatan yang dapat

memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, selaras dengan semangat *people-centered, people-oriented ASEAN*.

“Melalui kegiatan *coaching clinic* ini, PSA diharapkan akan semakin aktif dalam memanfaatkan *Trust Fund* dan *Project Fund* untuk melaksanakan beragam kegiatan yang dapat memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, selaras dengan semangat *people-centered, people-oriented ASEAN*.”



Dari kanan ke kiri: Bapak Ashariyadi, Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN (Moderator), Ibu Dr. Adriana Elisabeth M.Soc. Sc. Kepala Pusat Penelitian Politik, LIPI (Pembahas), Bapak Ali Wibisono, S.Sos, MA, PhD (PSA Universitas Indonesia) dan Ibu Sofia Trisni, S.IP (PSA Universitas Andalas). (Sumber foto: Dit. Infomed)



Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN, Bapak Benny Y.P. Siahaan menyampaikan sambutan pembukaan pada kegiatan Workshop Proposal Development ASEAN Trust Fund and Project Fund, 31 Agustus 2017



*Para peserta Konferensi Setnas ASEAN-Indonesia dan Pusat Studi ASEAN, 30 Agustus 2017
(Sumber foto: Dit. Infomed)*

Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-50 ASEAN yang diselenggarakan Ditjen Kerja Sama ASEAN



1 – 16 AGUSTUS 2017

Pencahayaan Tugu Monas dengan warna **ASEAN** dimulai dari pukul 18.00 WIB

* #ASEAN50

Mulai 1 Agustus 2017

Pemasangan *landmark* dalam bentuk tulisan **#ASEAN50** di Bundaran HI, Monas, Taman Lapangan Banteng, Kementerian Luar Negeri dan Pemda DKI



27 AGUSTUS 2017

Parade ASEAN 50



27 AGUSTUS 2017

Pengumuman pemenang *ASEAN Photo Contest* dan *ASEAN Vloggers Competition 2017* dilaksanakan pada saat **Parade ASEAN 50**



29 AGUSTUS 2017

Final Pemilihan Duta Muda ASEAN Indonesia 2017



30 AGUSTUS 2017

Konferensi Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia dengan Pusat Studi ASEAN



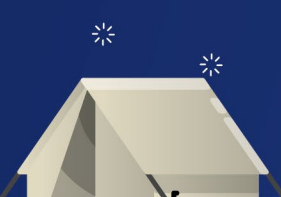
31 AGUSTUS 2017

Coaching Clinic Penyusunan Proposal untuk Memanfaatkan *Trust Fund* dan *Project Fund* bagi PSA



28 SEPTEMBER 2017

CEO Forum 2017: Sharing of Success Stories, Experiences and Best Practices



28-30 OKTOBER 2017

ASEAN Youth Interfaith Camp (AYIC) 2017.



Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

